

**IMPLEMENTASI INDIKATOR *SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Pembangunan**



**OLEH**

**Nama : Febrieza Purnama Sundari  
NPM : 1905180037  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

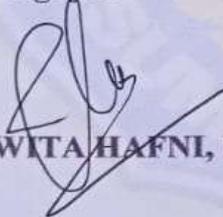
### MEMUTUSKAN

**NAMA** : FEBRIEZA PURNAMA SUNDARI  
**N P M** : 1905180037  
**PROGRAM STUDI** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI KABUPATEN LANGKAT

**DINYATAKAN** : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

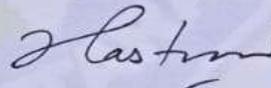
### Tim Penguji

Penguji I



(Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si.)

Penguji II



(HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si.)

### Pembimbing



(Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si.)

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



(Dr. H. JANURI, SE., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

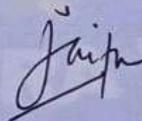
Skripsi ini disusun oleh :

Nama : FEBRIEZA PURNAMA SUNDARI  
NPM : 1905180037  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : Jl. AMPERA VII No. 38 MEDAN  
Judul : IMPLEMENTASI INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI KABUPATEN LANGKAT.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

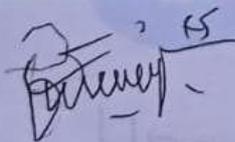


Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si.

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si.



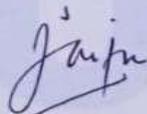
Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

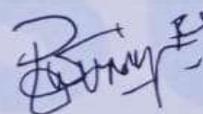
Nama Lengkap : Febrieza Purnama Sundari  
 N.P.M : 1905180037  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Alamat Rumah : Jl. Ampera VII No. 38 Medan  
 Judul Skripsi : Implementasi Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kabupaten Langkat

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
30-07-2023	- Deskripsi daerah penelitian, dikurangi sesuai arahan. - Masukkan data pendukungnya.	} Lu	
5-08-2023	- Jelaskan identitas responden - Tampilkan setiap pertanyaan dan analisis	} Lu	
10-08-2023	- Tambahkan kebijakan komkab langkat thd upaya pengentasan kemiskinan	} Lu	
26-08-2023	- Buat abstrak - Rapikan penulisan	} Lu	
24-08-2023	- Telah selesai direvisi dan ac untuk ujian	} Lu	

Pembimbing Skripsi



Medan, Agustus 2023  
 Diketahui /Disetujui  
 Ketua Program Studi  
 Ekonomi Pembangunan



Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FEBRIEZA PURNAMA SUNDARI

NPM : 1905180037

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Riset Ekonomi & Bisnis

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI KABUPATEN LANGKAT.”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.



Yang Menyatakan

Febrieza Purnama Sundari

**ABSTRAK**  
**“Implementasi Indikator *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Di  
Kabupaten Langkat”**

**Febrieza Purnama Sundari**

Program Studi Ekonomi Pembangunan

E-mail : [febriezapurnama17@gmail.com](mailto:febriezapurnama17@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara deskriptif tentang perkembangan penduduk miskin dan untuk melihat bagaimana implementasi SDGs terhadap penanganan kemiskinan, kelaparan, dan jaminan kehidupan sehat penduduk di Kabupaten Langkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Langkat dan data primer yang bersumber dari hasil penyebaran angket (kuesioner). Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Insidental* dan diperoleh sebanyak 40 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat menunjukkan kecenderungan menurun pasca kebijakan SDGs. Program bantuan yang diberikan pemerintah dianggap mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan penduduk karena dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah, serta kebutuhan dalam hal kesehatan. Penyaluran dana program bantuan dinilai sangat baik. Sebagian besar rumah tangga miskin di Kabupaten Langkat mendapatkan jaminan sosial kesehatan serta fasilitas kesehatan yang menjamin kesediaan layanan kesehatan bagi masyarakat.

***Kata Kunci*** : *Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Sustainable Development Goals (SDGs).*

## **ABSTRACT**

### **“Implementasi Indikator *Sustainable Development Goals* (Sdgs) Di Kabupaten Langkat”**

**Febrieza Purnama Sundari**

Study Program Ekonomi Development

E-mail : [febriezapurnama17@gmail.com](mailto:febriezapurnama17@gmail.com)

The purpose of this study is to carry out a descriptive analysis of the development of the poor and to see how the SDGs are implemented in dealing with poverty, hunger, and guaranteeing a healthy life for the population in Langkat Regency. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Langkat Regency and primary data sourced from questionnaires. The sampling technique used in this study was Incidental Sampling and obtained as many as 40 respondents. This research uses descriptive analysis method. The results of the study show that the number and percentage of poor people in Langkat Regency show a downward trend after the SDGs policy. The assistance program provided by the government is considered capable of helping to reduce the poverty rate of the population because it can help meet household needs, school needs, and health needs. Distribution of aid program funds is considered very good. Most of the poor households in Langkat District receive health social insurance and health facilities that guarantee the availability of health services for the community.

***Keywords*** : *Poverty, Population, Unemployment, and Sustainable Development Goals (SDGs).*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Implementasi Indikator *Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kabupaten Langkat***”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan Skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan proposal ini.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan cintai, yang selalu menjadi orang hebat dan kuat selama hidup saya, yang memberikan semangat dan dukungan kepada saya dalam menghadapi segala proses yang saya jalani dan membuat saya kuat dalam menghadapi segala situasi.

3. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dra. Hj. Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Lailan Safina Hasibuan, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi masukan kepada saya dengan penuh kesabaran membimbing saya.
8. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
9. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
10. Kepada adik saya (Dicky Khair) yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan saya (Fani, Risma, Luthfi, Icha) serta rekan sekelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi informasi mengenai perkuliahan, dan memberi semangat kepada saya.

12. Kepada teman dekat saya (Fariz, Fia, Haiqa) yang telah memberikan semangat dan menemani saya ketika skripsian .
13. Kepada grup seperjuangan saya yang telah memberikan semangat dan menemani saya ketika skripsian.

Akhir kata penulis berharap semoga proposal ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih , Wassamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Agustus 2023

Penulis

Febrieza Purnama Sundari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	19
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah .....	19
1.3.1 Batasan Masalah .....	19
1.3.2 Rumusan Masalah.....	20
1.4 Tujuan Penelitian.....	20
1.5 Manfaat Penelitian.....	20
1.5.1 Manfaat Akademik.....	21
1.5.2 Manfaat Non – akademik.....	21
<b>BAB II</b> .....	<b>22</b>
2.1 Landasan Teoritis.....	22
2.1.1 Pembangunan Ekonomi .....	22
2.1.2 Kemiskinan .....	32
2.1.3 Regulasi / Kebijakan Pemerintah.....	36
2.1.4 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	39
2.2 Penelitian Terdahulu .....	42
2.3 Kerangka Penelitian.....	45
2.3.1 Kerangka Berfikir .....	45
<b>BAB III</b> .....	<b>47</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
3.3 Jenis dan Sumber data .....	47

3.3.1 Jenis Data.....	47
3.3.2 Sumber Data .....	48
3.4 Populasi dan Sampel.....	48
3.4.1 Populasi.....	48
3.4.2 Sampel .....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Penelitian .....	50
3.6.1 Analisis Deskriptif .....	51
<b>BAB IV .....</b>	<b>52</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	52
4.1.1 Kondisi Geografis .....	52
4.1.2 Kondisi Pemerintahan.....	53
4.1.3 Kondisi Demografi .....	55
4.1.4 Kondisi Ekonomi .....	58
4.1.5 Kondisi Sosial .....	62
4.2 Analisis Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat Pasca Kebijakan SDGs Tahun 2016-2022.....	65
4.3 Evaluasi Kebijakan Sdgs Dalam Mencapai 3 Poin Tujuan Sdgs Yaitu Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan, Menghilangkan Kelaparan Dan Menjamin Kehidupan Yang Sehat Untuk Capaian Sdgs. ....	72
4.3.1 Deskripsi Responden .....	72
4.3.2 Idesntitas Responden .....	73
<b>BAB V.....</b>	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 17 Poin Tujuan SDGs .....	4
Gambar 1. 2 Jumlah (Juta Orang) dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia. 7	
Gambar 1. 3 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau pada September 2022.....	9
Gambar 1. 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2010 - 2022 .....	9
Gambar 1. 5 Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi Maret 2022 .....	10
Gambar 1. 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Langkat, 2011-2022 .....	12
Gambar 1. 7 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Langkat (Rp/Bulan/Kapita), 2012-2022.....	14
Gambar 1. 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2021-September 2022 .....	15
Gambar 1. 9 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Langkat, 2012-2022 .....	16
Gambar 1. 10 Relevansi Efektifitas Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Langkat Terhadap Provinsi dan Nasional.....	17
Gambar 1. 11 Relevansi Efektifitas Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Langkat Terhadap Provinsi dan Nasional .....	18
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	46
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Langkat .....	53
Gambar 4. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Langkat .....	56
Gambar 4. 3 Distribusi Persentase PDRB Menurut Kategori di Kabupaten Langkat, 2022 (%).....	59
Gambar 4. 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat .....	63
Gambar 4. 5 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Langkat, 2018-2022 .....	64
Gambar 4. 6 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Langkat (2016-2022).....	68
Gambar 4. 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan 2016-2022 .....	70
Gambar 4. 8 Indeks Keparahan Kemiskinan 2016-2022 .....	71
Gambar 4. 9 Usia.....	73
Gambar 4. 10 Pendidikan.....	74
Gambar 4. 11 Jumlah Tanggungan Keluarga .....	75
Gambar 4. 12 Jumlah Tanggungan Usia Sekolah .....	76
Gambar 4. 13 Status Kepemilikan Rumah.....	76
Gambar 4. 14 Jenis Lantai Tempat Tinggal Terluas .....	77
Gambar 4. 15 Jenis Dinding Rumah .....	78
Gambar 4. 16 Fasilitas MCK .....	78
Gambar 4. 17 Sumber Air Mandi Terbanyak .....	79
Gambar 4. 18 Akses Tenaga Kesehatan Terdekat .....	79
Gambar 4. 19 Akses Fasilitas Kesehatan Terdekat .....	80
Gambar 4. 20 Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan .....	81
Gambar 4. 21 Jenis Jaminan Kesehatan.....	81
Gambar 4. 22 Jenis Bantuan yang Diterima.....	82

Gambar 4. 23 Penyaluran dana program bantuan sudah sangat tepat waktu .....	82
Gambar 4. 24 Pembagian dana program bantuan dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin.....	83
Gambar 4. 25 Penyaluran dana program bantuan sudah berjalan dengan baik ....	84
Gambar 4. 26 Program bantuan yang diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.....	84
Gambar 4. 27 Program bantuan yang telah berjalan mampu mengentaskan kemiskinan .....	85
Gambar 4. 28 Program bantuan sudah tepat sasaran.....	86
Gambar 4. 29 Program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal pendidikan .....	87
Gambar 4. 30 Program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal kesehatan .....	87
Gambar 4. 31 Setiap anggota keluarga memperoleh layanan vaksinasi .....	88
Gambar 4. 32 Setiap anggota keluarga baru (bayi) memperoleh layanan imunisasi .....	89
Gambar 4. 33 Setiap ibu hamil memperoleh makanan tambahan.....	89
Gambar 4. 34 Memperoleh layanan fasilitas Kesehatan yang baik .....	90
Gambar 4. 35 Ketersediaan air bersih yang cukup .....	91
Gambar 4. 36 Memperoleh informasi tentang stunting dan pencegahannya .....	91
Gambar 4. 37 Memperoleh layanan jaminan Kesehatan yang baik.....	92

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017-2022 .....	11
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel 4. 1 Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Langkat.....	52
Tabel 4. 2 Statistik Pemerintahan Kabupaten Langkat .....	53
Tabel 4. 3 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Langkat .....	54
Tabel 4. 4 Indikator Kependudukan Kabupaten Langkat.....	55
Tabel 4. 5 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat .....	57
Tabel 4. 6 Perkembangan PDRB Kabupaten Langkat .....	59
Tabel 4. 7 Gini Ratio Kab. Langkat dan Sumatera Utara Tahun 2016-2022 .....	62
Tabel 4. 8 Statistik Pendidikan Kabupaten Langkat .....	63
Tabel 4. 9 Statistik Kesehatan Kabupaten Langkat.....	65
Tabel 4. 10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2022 .....	66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan dalam Pembangunan Ekonomi di setiap negara adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan dan perhatian utama dalam tujuan pembangunan di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Kemiskinan telah menjadi masalah berkelanjutan di Indonesia yang belum terselesaikan sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Kemiskinan selalu menjadi persoalan yang menjadi titik acuan keberhasilan setiap pemerintah dalam pembangunan nasional di negaranya dari waktu ke waktu terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat atau beberapa orang dalam mencukupi kebutuhan dasar hidup sehari – hari karena disebabkan keadaan masyarakat yang mengalami kekurangan. Indikator kemiskinan dilihat dari kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah yang merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut (Leasiwal, 2013). Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum. Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia. Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata sementara itu, banyak

negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya. (Todaro & Smith, 2017). Jika tingkat kemiskinan di suatu negara tinggi, maka keberhasilan pemerintah dalam pembangunan nasional menjadi jauh dan menyebabkan menjadi negara tertinggal. Salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum, Indonesia sadar bahwa memperhatikan masalah kemiskinan serta mengupayakan segala usaha untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah sangatlah penting.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu : (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industry. Transformasi structural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Todaro, 1999).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan merupakan rencana perubahan dalam memperbaiki keadaan hidup golongan masyarakat tertentu diberbagai aspek. Indikator keberhasilan pembangunan nasional dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di dalam suatu negara ataupun suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinannya. Kemiskinan menjadi salah satu tema utama dalam pembangunan perkotaan maupun pedesaan yang perlu menjadi perhatian. Untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan. (Sri Endang Rahayu; Hariani, P; Sinambela E, 2022)

Menurut Supriatna (1997:90) mengatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dapat dikatakan miskin jika ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, tingkat pendapatan, tingkat Kesehatan dan gizi, ketidaksetaraan derajat antar jenis kelamin serta buruknya lingkungan hidup. Kemiskinan juga bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia, baik lewat jalur Pendidikan formal maupun informal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya Pendidikan informal.

Banyak sekali dampak yang terjadi akibat tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu negara, diantaranya dapat menimbulkan tindak kriminalitas, meningkatnya angka pengangguran, munculnya berbagai masalah Kesehatan di masyarakat, kekacauan social dan politik, dan lainnya.

Sebagai isu ekonomi global yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, menghapus kemiskinan menjadi tujuan utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Sustainable Development Goals* (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global

periode 2016 – 2030 sebagai transformasi *Millenium Development Goals* (MDGs) untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs mempunyai



*Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*

**Gambar 1. 17 Poin Tujuan SDGs**

Pada gambar di atas terlihat 17 tujuan dari SDGs beserta dengan logonya. Segagai salah satu negara yang menyepakati SDGs dan juga melihat dari konteks masalah social, ekonomi, Pendidikan, lingkungan, Kesehatan, dan pembangunan, SDGs dirasa penting untuk diimplemmentasikan. Indonesia berkomitmen melalui peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam perpres tersebut menguraikan 17 tujuan dari implementasi SDGs (SDGs Indonesia, 2017).

SDGs Desa Nomor 1 Desa Tanpa Kemiskinan, yaitu desan tanpa kemiskinan menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 0% pada

tahun 2030. Artinya tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Berdasarkan RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi berupa rendahnya pendapatan, namun juga erat kaitannya dengan persoalan lain diantaranya : (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Dalam *Outcome Document Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development* tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan utama dari 17 tujuan yang disepakati dalam SDGs. Tujuan pertama dari 17 tujuan SDGs adalah “Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimana pun”.

Untuk mencapai target desa tanpa kemiskinan diperlukan kebijakan yang terintegrasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, seperti, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.

Adapun sasaran untuk mencapai target 0% kemiskinan di desa pada tahun 2030 diantaranya, sebanyak 100% masyarakat desa memiliki kartu jaminan kesehatan; penyandang disabilitas miskin dan perempuan kepala keluarga (PEKKA) 100 persen menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; cakupan pelayanan kesehatan, persalinan dan imunisasi, pemakaian kontrasepsi, akses air minum dan sanitasi baik 40 persen penduduk berpenghasilan terendah; akses dan

layanan pendidikan; hunian yang layak untuk penduduk berpendapatan rendah; serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya.

Menurut Suwadi, (2014:25) Kemiskinan di sebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama Kemiskinan di sebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya modal Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat di artikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.
- b. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

Yang kedua yaitu Kemiskinan yang di sebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat di lihat dari berbagai aspek yaitu :

- a. Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit di jangkau.
- b. Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota.
- c. Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi.

Menurut Word Bank (2004) dalam Wijianto mengatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti : makanan, pakaian, perumahan, dan tingkat Kesehatan serta tingkat pendidikan dimana kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan

lapangan pekerjaan dan biasanya yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) serta tingkat Pendidikan yang tidak memadai.



Sumber :BPS Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1. 2 Jumlah (Juta Orang) dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia**

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada periode Maret 2012 – September 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun presentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September

2020 terjadi Ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat 0,20 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,14 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan menurun 0,14 persen poin terhadap September 2021.

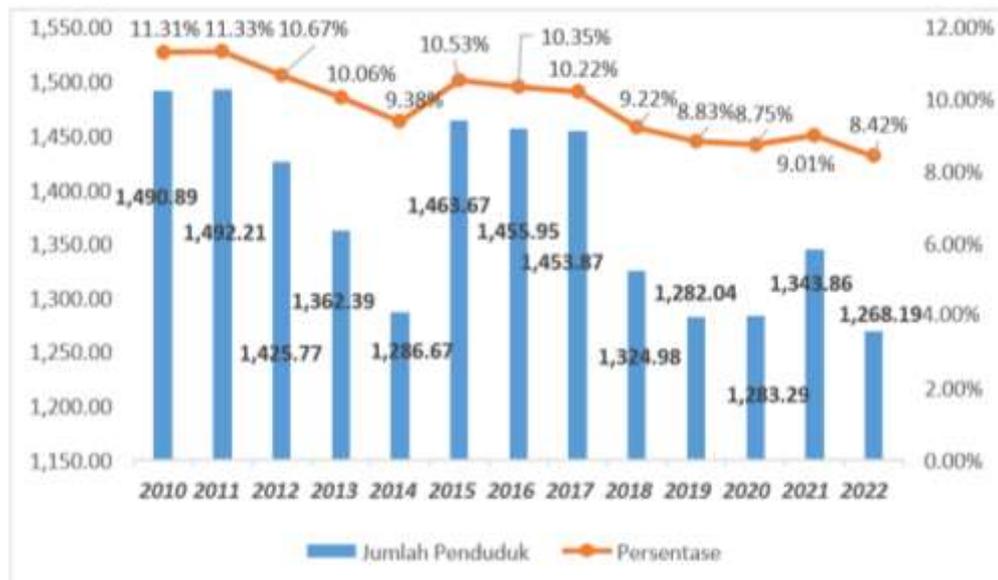
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022 – September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 0,16 juta orang, sedangkan di perdesaan naik sebesar 0,04 juta orang, persentase kemiskinan naik dari 7,50 persen menjadi 7,53 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen.



Sumber :BPS Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1. 3 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau pada September 2022**

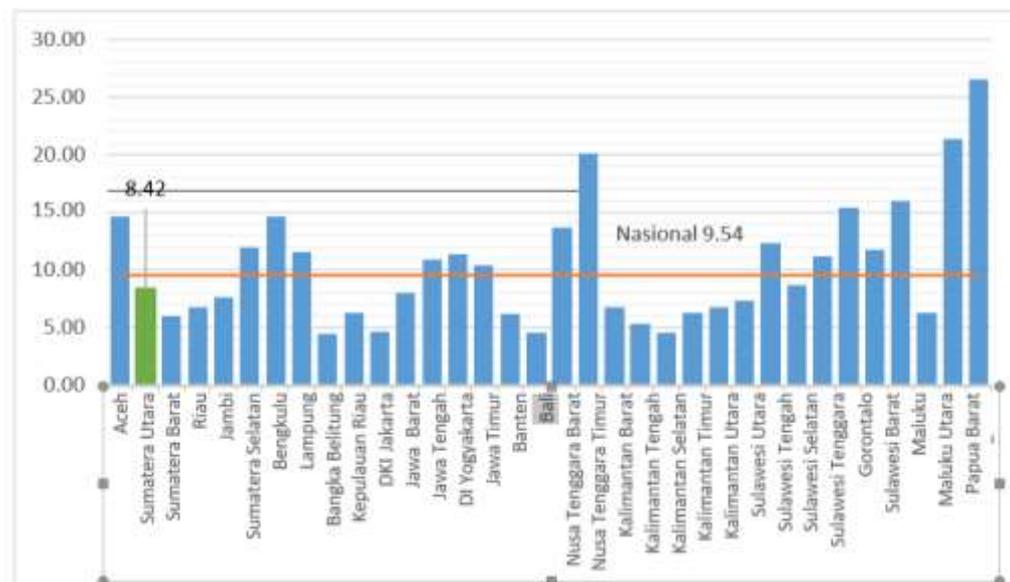
Gambar di atas menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada September 2022. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada pada wilayah Pulau Maluku dan Papua yaitu sebesar 20,10 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,90 persen. Dari sisi jumlah, Sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (13,94 juta orang). Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,99 juta orang). Pulau Sumatera berada pada posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Pulau Jawa yaitu sebanyak 5,67 juta orang.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1. 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2010 - 2022**

Gambar 1. 3 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara pada periode tahun 2010 – 2022. Pada periode tersebut perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara relative berfluktuasi dari tahun ke tahun. Secara absolut jumlah penurunan penduduk miskin pada periode 2010 – 2022 sebesar 222,70 ribu jiwa, yaitu dari 1.490,89 ribu jiwa pada maret 2010 menjadi 1.268,19 ribu jiwa pada Maret 2022. Secara relative juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari sebesar 11,31 persen pada Maret 2010 menjadi 8,42 persen pada Maret 2022.



Sumber: BPS Provinsi Sumatra Utara ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

### Gambar 1. 5 Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi Maret 2022

Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, pada Maret 2022 meskipun persentase penduduk miskin di Sumatera Utara berada sedikit di bawah persentase penduduk miskin Indonesia, akan tetapi persentase penduduk miskin di Sumatera Utara masih cukup tinggi dan menempati peringkat ke-17 dari

34 provinsi. Persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 9,54 persen dan Sumatera Utara 8,42 persen.

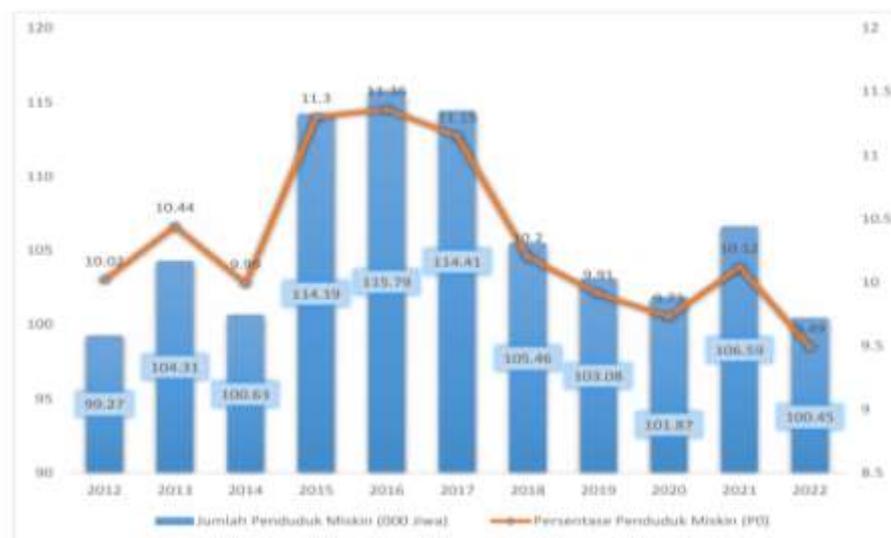
**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017-2022**

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Nias	24,68	22,61	22,10	23,12	24,33	23,23
2. Mandailing Natal	48,30	42,39	40,64	41,31	43,24	40,98
3. Tapanuli Selatan	29,48	25,63	24,22	23,96	25,01	23,05
4. Tapanuli Tengah	53,05	48,53	46,99	47,19	49,95	47,07
5. Tapanuli Utara	33,75	29,20	26,37	28,41	29,72	27,67
6. Tobo Samosir	18,49	15,82	15,78	16,05	16,61	16,48
7. Labuhan Batu	42,35	41,70	41,52	42,17	45,03	43,27
8. Asahan	83,67	74,14	70,53	66,32	69,29	64,49
9. Simakungun	91,35	80,30	76,33	73,64	76,99	72,67
10. Dairi	24,98	23,19	21,84	22,93	23,72	22,53
11. Karo	40,02	35,36	34,08	36,57	38,01	35,93
12. Deli Serdang	97,09	88,52	84,94	84,26	92,52	85,28
13. Langkat	114,41	105,46	103,08	101,87	106,99	100,45
14. Nias Selatan	57,95	52,70	52,51	53,88	55,16	54,16
15. Humbang Hasundutan	18,35	16,93	16,60	17,92	18,71	17,33
16. Pakpak Bharat	4,95	4,66	4,52	4,59	4,79	4,52
17. Samosir	18,43	16,81	15,79	15,8	16,08	14,97
18. Serdang Bedagai	56,93	50,49	48,69	49,18	51,16	48,22
19. Batakara	50,91	51,78	50,46	49,78	52,59	49,39
20. Padang Lawas Utara	27,98	26,82	26,06	26,79	28,37	26,09
21. Padang Lawas	24,42	23,05	23,17	23,87	25,78	24,45
22. Labuhan Batu Selatan	37,82	33,14	30,17	28,63	30,36	29,38
23. Labuhan Batu Utara	40,24	36,45	34,76	34,86	37,13	33,91
24. Nias Utara	29,47	26,33	24,42	24,75	25,84	22,87
25. Nias Barat	23,33	23,00	22,08	22,33	21,75	20,42
26. Sibolga	11,91	10,81	10,82	10,69	10,80	10,05
27. Tanjung Balai	24,69	25,30	24,54	23,54	24,10	22,65
28. Pematang Siantar	25,35	22,01	21,99	21,23	22,06	20,53
29. Telling Tinggi	19,04	16,64	16,30	16,32	17,37	16,34
30. Medan	204,22	186,45	183,79	183,54	193,03	187,74
31. Binjai	18,23	16,07	15,61	15,91	16,46	14,61
32. Padang Sidempuan	17,76	16,79	16,06	16,54	17,28	16,03
33. Gunung Sibul	30,08	25,91	23,06	23,54	24,02	21,85
<b>Sumatera Utara</b>	<b>1.453,87</b>	<b>1.324,98</b>	<b>1.282,04</b>	<b>1.283,29</b>	<b>1.343,86</b>	<b>1.268,19</b>

Sumber: BPS Provinsi Sumatra Utara ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Kabupaten Langkat menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak menurut Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Jumlah penduduk

miskin Langkat pada 2022 yaitu sebanyak 100,45 ribu jiwa penduduk atau 9,49 persen dari total penduduk Langkat. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding tahun 2021 yaitu sebanyak 106,59 ribu jiwa penduduk miskin atau sebesar 10,12 persen dari total penduduk.



Sumber: BPS Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1. 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Langkat, 2011-2022**

Dalam sepuluh tahun terakhir, persentase penduduk miskin tahun 2022 menempati angka terendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Setelah pernah menyentuh angka tertinggi 11,36 persen pada tahun 2016, persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat berhasil turun menjadi 9,49 persen di tahun 2022. Sejalan dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di tahun 2022 juga menempati angka yang cukup rendah dalam sepuluh tahun terakhir.

Jika dilihat dalam periode yang lebih pendek, terlihat bahwa baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020, kemudian meningkat kembali di

tahun 2021 dan Kembali turun cukup signifikan di tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah penduduk miskin Kabupaten Langkat turun 6,14 ribu jiwa dari 106,59 ribu jiwa di tahun 2021 menjadi 101,87 ribu jiwa di tahun 2022. Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat turut mengalami penurunan 0,63 persen dari 10,12 persen di tahun 2021 menjadi 9,49 perrsen di tahun 2022.

Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan terdapat penduduk yang pada tahun 2021 tergolong sebagai penduduk miskin namun pada tahun 2022 tidak lagi digolongkan sebagai penduduk miskin. Hal ini mungkin dikarenakan terdapat peningkatan rata – rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk tersebut di tahun 2022. Sehingga terdapat penduduk yang tergolong miskin di tahun 2022 keluar dari golongan penduduk miskin di tahun 2022 karena rata -rata pengeluaran per kapita per bulannya meningkat di atas garis kemiskinan.

Kelompok penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kelompok yang rentan dapat mengubah komposisi penduduk miskin karena sangat sensitive terhadap perubahan garis kemiskinan. Penduduk yang masuk kelompok ini mudah untuk keluar dari golongan penduduk miskin Ketika rata – rata pengeluaran perkapitanya meningkat diatas garis kemiskinan namun mudah masuk Kembali sebagai golongan penduduk miskin Ketika rata – rata pengeluaran perkapitanya mengalami penurunan atau pengeluaran perkapitanya tetap namun garis kemiskinan di tahun tersebut mengalami penurunan.



*Sumber: BPS Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))*

**Gambar 1. 7 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Langkat (Rp/Bulan/Kapita), 2012-2022**

Tren garis kemiskinan terlihat cenderung selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (gambar 2). Dalam satu dekade, garis kemiskinan Kabupaten Langkat telah meningkat sebesar 58,12 persen dari tahun 2012 yang tercatat sebesar Rp. 296.167,- menjadi Rp. 453.383,- di tahun 2022. Jika dilihat dalam setahun terakhir, Garis kemiskinan di Kabupaten Langkat mengalami peningkatan 4,86 persen dari tahun sebelumnya. Adapun garis kemiskinan di tahun 2021 berada di level Rp. 432.371,- per kapita per bulan, kemudian meningkat sebesar 4,86 persen atau sebesar Rp. 21.012,- per kapita per bulan di tahun 2022 menjadi Rp. 453.383,- per kapita per bulan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan selain untuk upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan indeks yang merepresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan). Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya pengentasan kemiskinan

dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat.

Semakin kecil nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Intervensi program pengentasan kemiskinan relatif lebih efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata – rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

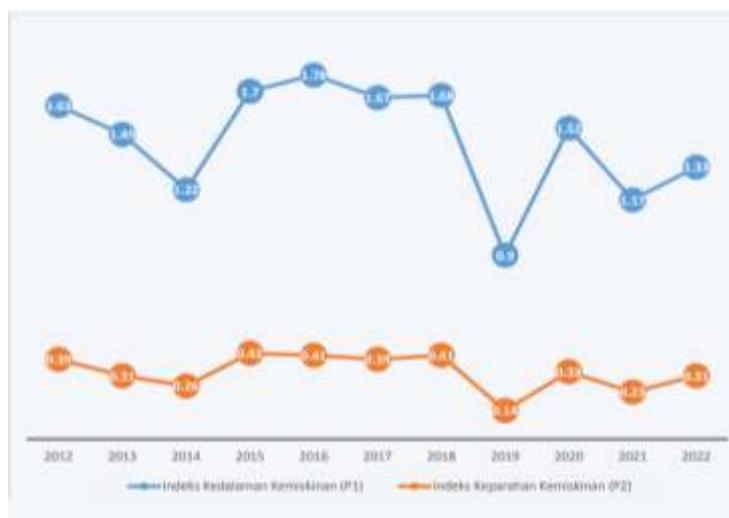
Sedangkan, Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan ukuran kemiskinan yang memberikan bobot yang lebih besar kepada masyarakat yang lebih miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)</b>			
September 2021	1,229	2,253	1,668
Maret 2022	1,187	2,125	1,586
September 2022	1,158	2,115	1,562
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)</b>			
September 2021	0,291	0,587	0,418
Maret 2022	0,286	0,542	0,395
September 2022	0,264	0,536	0,379

Sumber :BPS Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1. 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, September 2021-September 2022**

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) untuk perkotaan sebesar 1,158 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 2,115. Demikian pula dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di perkotaan adalah sebesar 0,264 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,536.



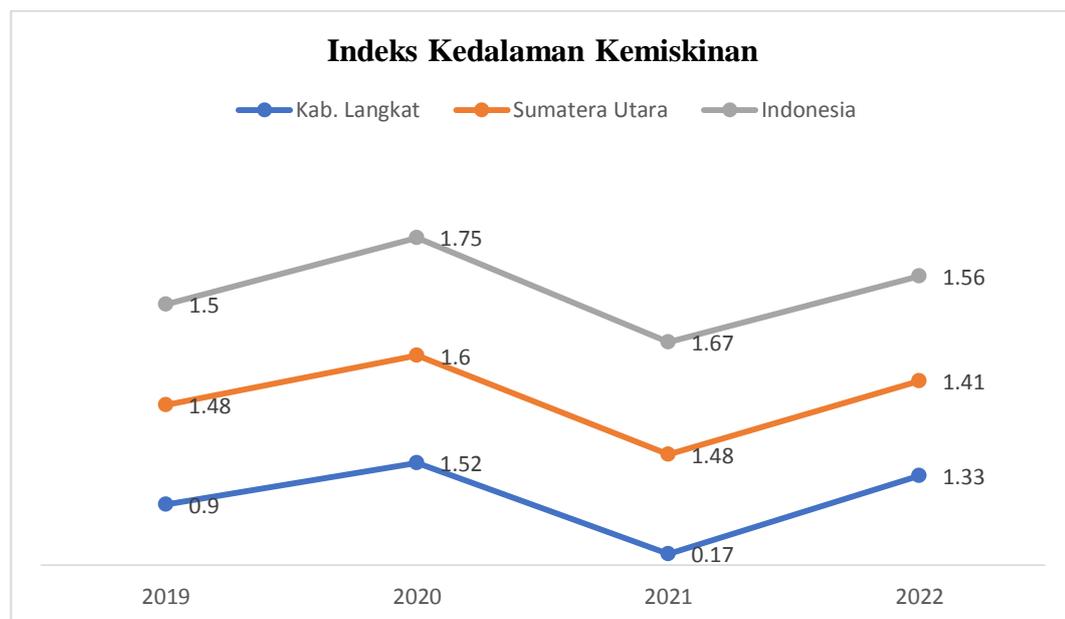
Sumber :BPS Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1. 9 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Langkat, 2012-2022**

Gambar diatas menunjukkan perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Langkat dalam periode 2012-2022. Dalam sepuluh tahun terakhir, perubahan indeks P1 terlihat lebih berfluktuasi dibandingkan dengan perubahan indeks P2. Artinya, rata – rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari gariss kemiskinan lebih

berfluktuasi dibandingkan dengan kesenjangan rata – rata pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri.

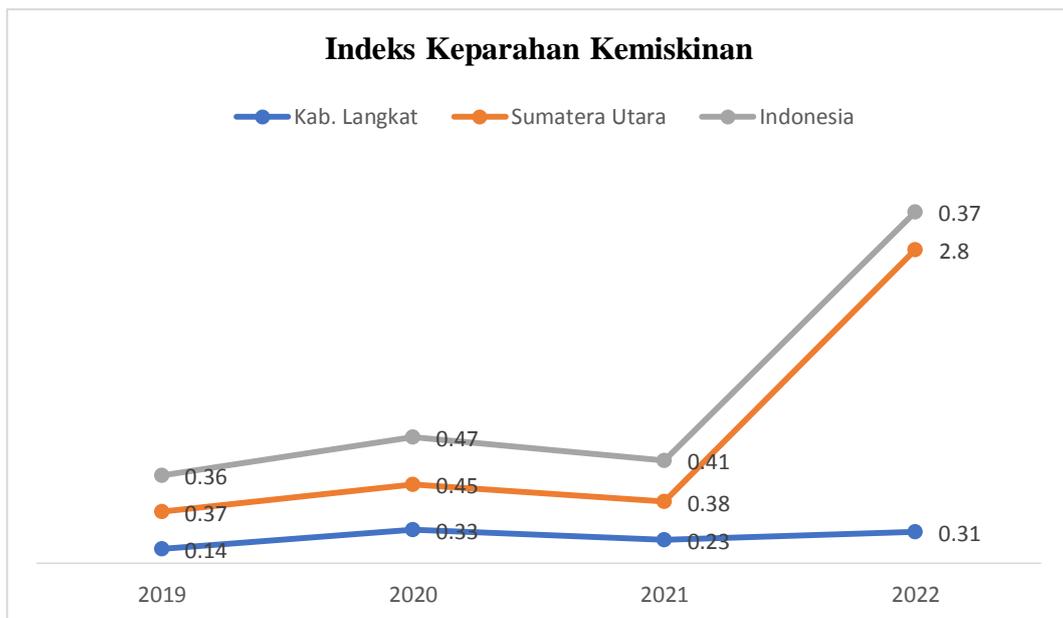
Dalam periode sepuluh tahun, rata – rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Hal ini ditandai dengan penurunan indeks P1 sebesar 0,30 poin dari 1,63 poin di tahun 2012 menjadi 1,333 poin di tahun 2022. Begitu pula dengan tingkat ketimpangan rata – rata pengeluaran antar penduduk miskin terlihat semakin merapat dalam sepuluh tahun terakhir.



Sumber :BPS Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1. 10 Relevansi Efektifitas Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab. Langkat Terhadap Provinsi dan Nasional**

Dari gambar grafik di atas terlihat bahwa, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Langkat pada tahun 2022 masih mencapai angka 1.33, namun lebih optimal bila dibandingkan dengan capaian indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional.



Sumber :BPS Indonesia ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 1. 11 Relevansi Efektifitas Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab. Langkat Terhadap Provinsi dan Nasional**

Pada grafik di atas dapat dilihat capaian indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Langkat pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Bila dibandingkan dengan capaian P2 Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, angka indeks keparahan kemiskinan masih berada pada posisi optimal.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapat beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Kabupaten Langkat menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak menurut Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Jumlah penduduk miskin Langkat pada 2022 yaitu sebanyak 100,45 ribu jiwa penduduk atau 9,49 persen dari total penduduk Langkat.
2. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ) untuk perkotaan sebesar 1,158 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 2,115. Demikian pula dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di perkotaan adalah sebesar 0,264 sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,536.
3. Capaian indeks keparahan kemiskin Kabupaten Langkat pada tahun 2022 mengalami kenaikan berada pada nilai 0.31.

## **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1.3.1 Batasan Masalah**

Ada banyak masalah yang bisa diangkat dari penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah. Kabupaten Langkat memiliki 23 kecamatan, namun dalam penelitian ini Kecamatan Tanjung Pura menjadi Sampel penelitian. Serta dalam 17 poin SDGs

penelitian ini hanya mengambil 3 poin yang menjadi focus utama. Jadi penelitian ini hanya dibatasi untuk mengetahui bagaimana tingkat kemiskinan dan bagaimana implementasi penerapan SDGs di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

### **1.3.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Langkat pasca kebijakan SDGs (2016-2022)?
2. Bagaimana implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam penanggulangan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan menjamin kehidupan yang sehat di Kabupaten Langkat dalam mencapai 3 poin tujuan SDGs?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang tingkat kemiskinan di Kabupaten Langkat pasca kebijakan SDGs (2016-2022).
2. Untuk mengevaluasi kebijakan SDGs dalam mencapai 3 poin tujuan SDGs yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan menjamin kehidupan yang sehat untuk capaian SDGs.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor pembangunan ekonomi. Manfaat yang dapat diambil diantaranya :

### **1.5.1 Manfaat Akademik**

a. Bagi peneliti :

- 1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- 2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi Mahasiswa :

- 1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistemis.
- 2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

### **1.5.2 Manfaat Non – akademik**

Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah. Penelitian ini dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teoritis**

##### **2.1.1 Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional (*gross national income-GNI*) per kapita “*rill*” (pertumbuhan monetes dari GNI per kapita dikurangi tingkat inflasi) sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan-seberapa banyak barang dan jasa *rill* yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata – rata penduduk (Todaro & Smith, 2017).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap – sikap masyarakat, dan institusi – institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith 2017).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf Pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat.

Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja semakin bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006).

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan faktor pendukung agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan pembangunan, salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Pembentukan modal meliputi modal meteril maupun modal manusia. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya pembentukan modal diharapkan tujuan pokok pembangunan akan tercipta (Jhingan, 2010).

#### **A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik**

##### **1. Adam Smith**

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776 terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistemik namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini :

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasaarnya menentang setiap campur – tangan

pemerintah dalam industry perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persandingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan : (1) meningkatkan keterampilan pekerja; (2) penghematan waktu dalam memproduksi barang; (3) penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar”. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan

cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus – menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan”. Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak – banyaknya. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

## 2. David Ricardo

David Ricardo juga mengungkapkan pandangannya mengenai pembangunan ekonomi dengan cara yang tidak sistematis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan tahun 1817. Edisi ketiga 1921 serta korespondensi Ricardo dengan beberapa ahli ekonomi lainlah yang menurut ide – ide Ricardo yang menjadi dasar pembentukan model pembangunan Ricardo. Sesungguhnya Ricardo tidak pernah mengajukan satu pun teori pembangunan. Menurut Schumpeter, ia hanya mendiskusikan teori distribusi. Oleh sebab itu Analisa Ricardo merupakan Analisa yang memutar.

Asumsi teori Ricardo Teori – teori Ricardian didasarkan pada asumsi bahwa :

- 1) Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan Angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industry;
- 2) “*law of diminishing return*” berlaku bagi tanah;
- 3) Persediaan tanah adalah tetap;
- 4) Permintaan akan gandum benar – benar inelastis;
- 5) Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel;

- 6) Keadaan pengetahuan Teknik adalah tertentu (*given*);
- 7) Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal;
- 8) Harga penawaran buruh adalah tertentu dan tetap;
- 9) Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal; dan baik harga permintaan maupun penawaran buruh tidak tergantung pada produktivitas marginal tenaga kerja;
- 10) Terdapat persaingan yang sempurna;
- 11) Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan;

Berdasarkan asumsi tersebut, Ricardo membangun teorinya tentang saling hubungan antara tiga kelompok dalam perekonomian, yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Kepada mereka inilah keseluruhan hasil dibagi – bagikan. Sementara Ricardo sendiri menulis dalam bukunya, “Hasil bumi (hasil yang diperoleh dari permukaannya dengan menggunakan buruh secara terpadu, mekanisasi, dan modal) dibagi – bagikan kepada tiga kelas masyarakat yaitu pemilik tanah, pemilik stok kapital yang diperlukan bagi pengolahan tanah, dan para buruh yang mengerjakan”. Keseluruhan pendapatan nasional dibagi – bagikan kepada tiga kelompok tersebut masing – masing sebagai uang sewa, keuntungan dan upah (Jhingan,2010).

### **B. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis**

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga

membahas pola investasi yang terjadi di sector modern dan juga system penetapan upah yang berlaku di sector modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengsumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu :

### 1. Perekonomia Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sector pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata – rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

### 2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sector yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif.

Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada system produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Makin industry di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, akan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relative bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk *horizontal*. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sector modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sector modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh ekspansi di sektor industry dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan Kembali modal yang ada ke industry tersebut.

### **C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery**

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industry dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari

pertanian tradisional beralih ke sektor industry sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industry. Peningkatan peran sektor industry dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*). (Todaro & Smith, 2017)

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industry, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi structural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meingkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industry pada masa transisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2017)

Salah satu dampak negative dari perubahan structural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, dimana peningkatan pendapatahn hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu, di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperbesar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi structural hanya akan berjalan dengan baik jika

diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualis ekonomi antar desa dan kota. Jika hal ini dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2017)

#### **D. Teori Pembangunan Ekonomi Fei – Ranis**

Teori pembangunan ekonomi Fei – Ranis berkenaan dengan suatu negara terbelakang yang kelebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana Sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonomi pertaniannya berhenti. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional. Bidang – bidang non pertanian memang ada tetapi begitu banyak mempergunakan modal. Disitu juga ada sektor industry yang aktif dan dinamis. Pembangunan terdiri dari pengalokasian Kembali surplus tenaga kerja di bidang pertanian, yang sumbangannya terhadap *output* adalah nol atau dapat diabaikan ke sektor industry dimana mereka menjadi produktif dengan upah yang sama dengan upah di bidang pertanian.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Ranis membuat asumsi berikut :

- 1) Ada ekonomi dua – muka yang terbagi dalam sektor pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industry yang aktif.
- 2) *Output* sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja.

- 3) Di sektor pertanian tidak ada konsumsi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah Kembali (reklamasi).
- 4) Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap/
- 5) Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel.
- 6) Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol. Jika penduduk melampaui jumlah dimana produktivitas marginal buruhnya nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industry tanpa mengurangi keluaran (*output*) pertanian.
- 7) *Output* sektor industry adalah fungsi dari modal dan buruh aja.
- 8) Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen.
- 9) Upaya nyata di sektor industry dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian.
- 10) Pekerja masing – masing sektor hanya mengkonsumsi produk – produk pertanian.

Berdasarkan asumsi ini, Fei dan Ranis menelaah pembangunan ekonomi surplus – buruh menjadi tiga tahap. Pada *tahap pertama*, para penganggur tersamar yang tidak menambah output pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada *tahap kedua*, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil daripada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali *tahap ketiga*, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar daripada perolehan upah institusional. Di

dalam tahap ini kelebihan buruh sudah terserap dan sektor pertanian berangkat menjadi komersial.

### **2.1.2 Kemiskinan**

Konsep kemiskinan yang digunakan BPS yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dikatakan miskin apabila sering menderita kekurangan gizi dan tingkat Kesehatan yang buruk, sedikit melek huruf atau buta huruf sama sekali, hidup di lingkungan yang buruk, kurang terwakili secara politis, dan berusaha memperoleh penghasilan yang minim disebuah pertanian kecil dan marginal atau di daerah kumuh (Todaro, 2011, 231).

Menurut Haughton dan Shahidur (2012:3) kemiskinan selalu berhubungan dengan ketimpangan, dan kerentanan karena orang yang tidak di anggap miskin bisa saja sewaktu-waktu menjadi miskin jika mengalami permasalahan misalkan krisis finansial, dan penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan merupakan sebuah dimensi pokok kesejahteraan karena hal tersebut mempengaruhi tingkah laku setiap individu dalam hal investasi, pola produksi dan strategi yang sesuai serta persepsi tentang situasi masing-masing.

#### **A. Jenis-jenis Kemiskinan dan Ciri-ciri Penduduk Miskin**

Kemiskinan menurut Arsyad, (2010) dalam Ayu dan Ayu (2012) kemiskinan di bagi menjadi dua jenis yaitu :

- 1) Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang di ukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar

kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya.

- 2) Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

Menurut Sony Harry. (2007) dalam Nurwati. (2008) Kemiskinan dapat di bedakan menjadi dua yaitu kemiskinan bersifat kronis, dan kemiskinan bersifat sementara.

- 1) Kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang dapat di lihat dari kondisi alam, infrastruktur, yang sangat sulit untuk akses perekonomian. Biasanya berada di tempat yang terpencil, yang sangat sulit untuk kegiatan apapun demi kelangsungan hidup. Kondisi ini membuat kemiskinan menjadi berkepanjangan.
- 2) Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang bersifat sementara atau pada waktu tertentu kondisi kehidupan dapat berubah menjadi baik, misalnya masyarakat mengalami bencana alam, pada saat itu masyarakat mengalami kemiskinan sedangkan pasca bencana bisa kembali hidup dengan normal.

Menurut Suryawati, (2005) kemiskinan dapat di lihat dari ciri-ciri kelompok penduduk sebagai berikut :

- 1) Mempunyai pendidikan yang rendah

- 2) Kebanyakan mempunyai usaha sendiri atau bekerja dalam sektor informal, yang sifatnya kecil.
- 3) Tidak mempunyai faktor produksi sendiri misalnya tanah, keterampilan dan peralatan untuk bekerja.
- 4) Kurangnya memperoleh fasilitas umum

## **B. Penyebab Kemiskinan**

Menurut Suwadi, (2014:25) Kemiskinan di sebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama Kemiskinan di sebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

- 1) Keterbatasan sumber daya modal Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat di artikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.
- 2) Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju.

Yang kedua yaitu Kemiskinan yang di sebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat di lihat dari berbagai aspek yaitu :

- 1) Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit di jangkau.

- 2) Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota.
- 3) Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi.

### **C. Indikator Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan**

Menurut Badan Pusat Statistik Ponorogo (2016) kemiskinan dapat di lihat dengan cara menggunakan perhitungan Head Count index, adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

- 1) Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1) adalah ukuran pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk terhadap Garis Kemiskinan.
- 2) Indeks Keparahan Kemiskinan (p2) adalah ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi pula pengeluaran penduduk miskin.

Menurut Sayogyo (dalam Suwadi 2014:27) menjelaskan tentang teori dari lincolin arsyad kemiskinan dapat di lihat atau di ukur dari :

- 1) Indikator Tingkat Konsumsi Beras mengukur berapa banyak tingkat konsumsi beras per kapita per tahun, dengan rincian ada tiga kategori miskin yaitu sangat miskin, miskin dan nyaris miskin.
- 2) Indikator Tingkat Pendapatan Dalam pengukuran pendapatan di lihat dari pendapatan perkapita. Dan dapat di lihat dari Garis kemiskinan, Jumlah penduduk miskin di ukur dari pengeluaran per

hari satu dolar Amerika. Kalau ukuranya dua dolar per hari maka termasuk miskin.

#### **D. Dampak Kemiskinan**

Kemiskinan sebagai mana permasalahan sosial dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas. Kemiskinan juga dapat memberikan dampak-dampak lain, seperti .Meningkatnya Kriminalitas di Suatu Daerah.

- 1) Angka Kematian Meningkat
- 2) Akses Mendapatkan Pendidikan Tertutup
- 3) Meningkatnya Angka Pengangguran.
- 4) Konflik yang Terjadi di Masyarakat akan Bermunculan

### **2.1.3 Regulasi / Kebijakan Pemerintah**

#### **A. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan**

##### **1. Program PKH**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan social dari pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejak 2007 pemerintah sudah melakukan program ini. Keluarga Penerima Manfaat bisa menggunakan fasilitas – fasilitas yang sudah di subsidi oleh pemerintah seperti fasilitas Kesehatan dan Pendidikan. Tujuan dari program PKH ini adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

##### **1. Pemerintah Konsentrasi dalam Kawasan 3T**

Program 3T (terpencil, tertinggal dan terdepan) merupakan program pemerintah untuk wilayah – wilayah di sekitar perbatasan dan pulau – pulau yang belum terjangkau seperti pegunungan di Papua dan sebagainya. Pemerintah haruslah bersinergi dengan masyarakat sekitar atau pemerintah tidak bisa bersinergi kemiskinan tidak akan hilang.

## 2. Stabilitas Harga

Stabilitas harga terhadap kemiskinan sangatlah berhubungan, karena jika harga bahan pokok di masyarakat melambung bisa menyebabkan kemiskinan. Karena jika harga komoditi seperti pangan harganya stabil menyebabkan daya beli masyarakat bertambah. Hal tersebut tentu sangat baik untuk mengurangi tingkat kemiskinan, karena tingkat konsumsi masyarakat bertambah.

## 3. Dana Desa

Dengan dikeluarkannya Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menunjukkan pemerintah sangat serius menangani masalah kemiskinan. Dengan memberantas kemiskinan mulai dari tingkat yang paling rendah, tentunya akan memudahkan untuk tingkat selanjutnya.

## **B. Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*) yang diukur dengan menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antarnegara dan antar waktu.

Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2030 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Namun, pemerintah ingin menuntaskannya enam tahun lebih cepat yaitu pada akhir 2024. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu :

a. Penurunan beban pengeluaran masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan social dan jaminan social, yaitu :

- 1) Bantuan social regular, seperti Program Keluarg Harapan dan Kartu Sembako.
- 2) Bantuan social khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top UP* bansos regular.
- 3) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- 4) Bantuan dan rehabilitasi social bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

b. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui :

- 1) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat Karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.

- 3) Peningkatan akses terhadap asset produktif, akses pinjam modal, dan akses penggunaan lahan.
- 4) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
- 5) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui :

- 1) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur Pendidikan, layanan dan infrastruktur Kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
- 2) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

#### **2.1.4 Sustainable Development Goals (SDGs)**

*Sustainable Development Goals* atau SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan – perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan soasial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs mempunyai tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara – negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi) dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara – negara berkembang (kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

Adapun tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dikutip dari lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017, antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk semua usia.
4. Tujuan 4 Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Tujuan 6 Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Tujuan 7 menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
11. Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan.
12. Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Tujuan 13 Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Tujuan 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Tujuan 16 Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Tujuan 17 Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Poin pertama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Kemiskinan (No Poverty), yang berarti mengakhiri semua kemiskinan di Negara mana pun. Kemiskinan adalah kurangnya pendapatan sumber daya manusia untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan. Kemiskinan tidak hanya terjadi pada bidang ekonomi, tetapi dalam akses lain, seperti kurangnya akses Pendidikan, Kesehatan,

dan sumber daya alam. SDGs yang akan dicapai pada tahun 2020 Target poin 1 bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya pada tahun 2030 (Binus University, 2018)

Dalam tujuannya, poin pertama ingin mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Seperti yang dikemukakan Kennedy (2020) menjelaskan bahwa tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana melalui program – program yang dilaksanakan. Hal ini merupakan salah satu tujuan yang dicanangkan pemerintah Indonesia dalam agenda SDGs di Indonesia.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian dan Judul Penelitian	Model estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1	Aulia Indah Sari, Dra. Lucia Indrawati, M.Si (2021), Implementasi SDGs dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Temanggung	Analisis Deskriptif	Kemiskinan, Pembangunan Berkelanjutan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung cukup serius dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan, ini terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupten Temanggung setiap tahunnya. Banyak target program indikator SDG's yng telah mencapai target dari tahun 2015-2019. Namun, terdapat sejumlah program yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung karena implementasinya masih jauh dari target yang diharapkan.
2	Tantyo Nandi Purwoko (2023), Implementasi Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandar	Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif	Kemiskinan, SDGs	Hasil penelitian Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menanggulangi kemiskinan menunjukkan bahwa : 1) Standar dan

	Lampung			<p>tujuan kebijakan sudah berhasil menerapkan nilai implementasi. 2) Sumber daya kurang berhasil menerapkan nilai implementasi. 3) Disposisi atau sikap para pelaksana cukup berhasil menerapkan nilai implementasi. Program Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu program keluarga harapan (PKH), program keluarga harapan (PKH) sudah mencapai tujuannya yang tepat objek dan tepat sasaran penerimanya, sehingga dapat memberikan hasil yang baik dalam menanggulangi angka kemiskinan terdapat 34.444 dari total 76.553 rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Kota Bandar Lampung yang telah memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Artinya, sebesar 44.99% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Kota Bandar Lampung yang telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Maka, kesimpulan pada penelitian ini sudah berhasil menerapkan nilai implementasi kebijakan.</p>
3	Islam Faruk Zaini (2021), Kebijakan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)	Kualitatif	SDGs, SDGs Desa, Bantuan, Miskin	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Sustainable Development Goals pemerintah Desa Wargajaya mengaplikasikan program turunan yang dicanangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu SDGs Desa. SDGs Desa dalam pengaplikasiannya ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap para warga, perangkat desa (desa) dan rukun warga (RW). Hal itu ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang konkret mengenai persoalan dan kehidupan</p>

				masyarakat di Desa Wargajaya
4	Meli Inata Paringansa (2022), Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Mencapai <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Berbasis <i>Collaborative Governance</i> Pada Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul	Kualitatif deskriptif	Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), SDGs	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam mengurangi angka kemiskinan dengan diberikannya bantuan sosial setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya, yang menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan lembaga yang berperan penting dalam penurunan jumlah penduduk miskin.
5	Riska Islamiyah (2021), Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mencapai Sustainable Development Goals Di Kabupaten Pangkep	Kualitatif Deskriptif	Program Keluarga Harapan, Kebijakan Publik, SDGs, Adaptive Policies	Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pangkep dengan mengacu pada teori Adaptive Policies menurut Swanson & Bhadwal (2009), dari 7 indikator, 5 diantaranya sudah diimplementasikan dengan baik untuk dapat berhasil dalam pencapaian tujuan 1 SDGs 2030 yaitu terkait Integrated and forward-looking analysis, Automatic policy adjustment, Decentralization of decision-making, Promoting variation, dan Formal policy review and continuous learning. Akan tetapi 2 diantaranya belum optimal yaitu terkait multistakeholders deliberation dan Enabling self-organization and social networking. Adapun penelitian ini menemukan hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut adalah kurangnya keterlibatan sektor privat, kendala geografis wilayah, hingga pola pikir masyarakat dalam menerima bantuan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan di negara – negara berkembang dan salah satunya adalah Indonesia. Penelitian tentang kemiskinan ini memiliki banyak variabel – variabel yang dapat mempengaruhinya sehingga begitu penting untuk melihat yang paling mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut. Berdasarkan penelitian – penelitian terdahulu beberapa pembahasan masalah kemiskinan di atas sangat penting dijadikan pendukung dalam skripsi ini sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama – sama membahas tentang masalah Kemiskinan guna mencari solusi yang tepat dalam membantu menyelesaikan masalah pembangunan di Kabupaten Langkat melalui beberapa indikator ekonomi makro yang dianggap penting untuk dibahas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas tentang pengaruh kemiskinan melalui beberapa indikator ekonomi makro yang dipilih peneliti sesuai dengan masalah yang ada. Penelitian yang dilakukan saat ini juga merupakan gabungan dari beberapa variabel yang ada pada penelitian – penelitian terdahulu yang dianggap dapat mempengaruhi kemiskinan secara langsung dengan kerangka berfikir dan waktu yang berbeda.

## **2.3 Kerangka Penelitian**

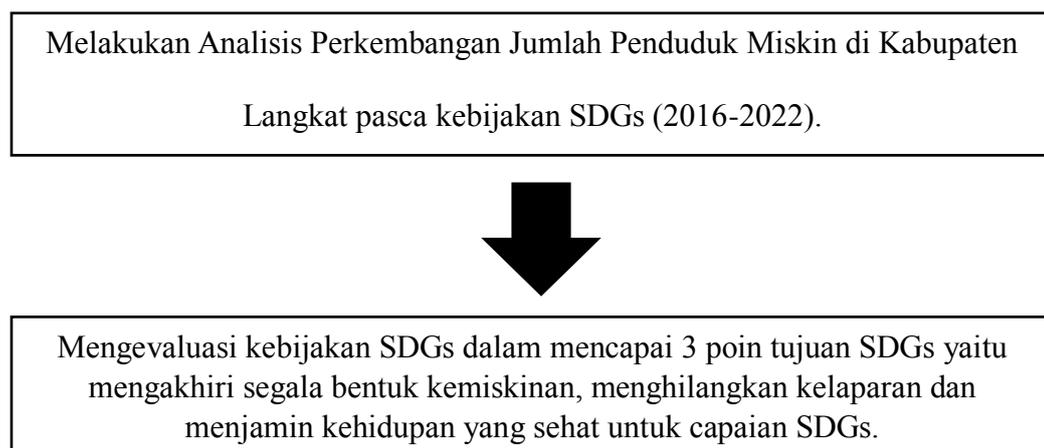
### **2.3.1 Kerangka Berfikir**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu program global yang bertujuan terhadap peningkatan manusia, planet, kesejahteraan, kedamaian dan Kerjasama. SDGs sebagai sebuah tujuan pembangunan berkelanjutan

berusaha agar seluruh masyarakat dunia mendapatkan kehidupan yang sejahtera, tanpa ada negara yang tertinggal dalam hal kesejahteraan. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, SDGs mengeluarkan 17 tujuan sebagai program pembangunan berkelanjutan. Dari 17 tujuan, tujuan nomor satu yang ingin dicapai ialah “*No Poverty*” menghilangkan kemiskinan dimanapun kemiskinan tersebut berada.

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam *United Nations* (PBB) turut serta mengaplikasikan SDGs ke dalam kebijakan pembangunannya sebagai arah tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Penerapan SDGs tidak hanya di kota – kota, melainkan juga memasuki wilayah pedesaan yang memiliki banyak persoalan mengenai pembangunan. SDGs yang diterapkan di pedesaan bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan yang ada di desa, terkhusus bagi persoalan kemiskinan yang Sebagian besar kemiskinan di Indonesia terjadi di wilayah pedesaan.

Perangkat desa sebagai pelaksana dari tujuan “*No Poverty*” pada program SDGs berkewajiban untuk melaksanakan tujuan tersebut agar masyarakat pedesaan bisa merasakan kesejahteraan social yang berkeadilan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya SDGs masyarakat miskin di wilayah pedesaan menjadi semakin berkurang dan sejahtera.



**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang berbentuk penjelasan atau keterangan. Data yang disajikan adalah data *primer*, dimana data *primer* diperoleh berdasarkan hasil langsung di lapangan.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan 2 bulan mulai Juni sampai Juli 2023.

#### **3.3 Jenis dan Sumber data**

##### **3.3.1 Jenis Data**

Data yang dibutuhkan menurut sifatnya adalah berupa data kualitatif (berupa penjelasan dan keterangan). Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Pada umumnya data kualitatif bersifat data ordinal yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, maupun posisi data yang tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam bentuk skala peringkat (Kuncoro, 2013).

### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang di dapat dengan melakukan penelitian langsung berupa menyebarkan kuisisioner, wawancara langsung berupa kuisisioner wawancara langsung kepada para pengguna (Kuncoro, 2013).

## 3.4 Populasi dan Sampel

### 3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018 : 130) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4228 Keluarga Pra Sejahtera yang ada di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

### 3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018 : 131) sampel penelitian adalah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Insidental*. Teknik ini merupakan Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau insidenta, artinya siapapun orangnya yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dengan catatan bahwa peneliti melihat orang tersebut layak digunakan sebagai sumber data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan derajat kesalahan atau  $\alpha = 15\%$  dengan derajat kepercayaan 85%, artinya peneliti yakin bahwa dalam hal mengestimasi parameter populasi tingkat kebenarannya 85%. Alasan peneliti menggunakan  $\alpha = 15\%$  karena adanya keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya lainnya dalam melakukan penelitian.

Maka dalam hal penarikan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Toleransi Kesalahan (error tolerance) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, yaitu 15%.

Persentase kelonggaran ketidaktelitian menggunakan 15% karena dari hasil sampel yang didapatkan dianggap sudah mewakili populasi. Maka besarnya sampel adalah :

$$n = \frac{4228}{1 + 4228 \times 15\%^2}$$

$$n = \frac{4228}{96,13}$$

$$n = 43,98 \text{ (44 Responden)}$$

Dari perhitungan diatas maka didapatkan jumlah sampel yaitu sebanyak 44 responden rumah tangga.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Teknik *probability sampling*. Teknik *probability sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini merupakan Teknik yang memungkinkan peneliti atau evaluator untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi.. Data primer diperoleh menggunakan kuisisioner ( angket ) yaitu suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan, serta informasi yang dibutuhkan secara serentak (Kuncoro, 2013).

Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat pendamping dalam pengumpulan data. Daftar pertanyaan dibuat semi terbuka yang memberi pilihan jawaban pada responden dan memberikan penjelasan – penjelasan yang diperlukan oleh peneliti.

### **3.6 Teknik Analisis Penelitian**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. data yang diperoleh diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang sistematis. Keseluruhan data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara akan dianalisis menggunakan teknik seperti berikut :

### **3.6.1 Analisis Deskriptif**

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Langkat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat

##### 4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Langkat sebagai salah satu kabupaten di ujung utara Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh dibagian Utara dan Barat, serta berbatasan dengan Selat Malaka di Utara. Sedangkan, disebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Timur.

Secara astronomis berada antara  $3^{\circ}14'00''$  dan  $4^{\circ}13'00''$  Lintang Utara dan antara  $97^{\circ}52'00''$  dan  $98^{\circ}45'00''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Langkat 6.263,29 km<sup>2</sup> atau 8,74 persen dari total luas Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat berada pada ketinggian 0 – 1200 m dari permukaan laut dengan curah hujan selama tahun 2022 tercatat 2.784 mm dan hari hujan sebanyak 271 hari.

**Tabel 4. 1 Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Langkat**

Uraian	Satuan	2022
Luas	Km <sup>2</sup>	6 263,29
Lahan Pertanian	Ha	570 291,6
Sawah	Ha	22 557,60
Bukan Sawah	Ha	547 734,00
Lahan Non Pertanian	Ha	53 923,00
Ketinggian dpl	m	0 – 1200
Curah Hujan	mm	2 784
Hari Hujan	Hari	271

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka 2023 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))



Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka 2023 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Kabupaten Langkat memiliki 23 kecamatan, 240 desa dan 37 kelurahan. Ada 2 kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak, yaitu Bahorok dan Tanjung Pura. Masing-masing terdiri dari 19 desa/kelurahan. Sedangkan yang memiliki desa/kelurahan paling sedikit ada 3 kecamatan yaitu Binjai, Sawit Seberang dan Brandan Barat masing-masing terdiri dari 7 desa/kelurahan.

Dilihat berdasarkan golongan, pada tahun 2022, jumlah pegawai golongan I sebanyak 27 orang atau 0,30%, golongan II sebanyak 1.223 orang atau 13,41%, golongan III sebanyak 5.026 orang atau 55,12% dan golongan IV sebanyak 2.843 orang atau 31,18%.

**Tabel 4. 3 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Langkat**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Ibukota Kecamatan
1	Bahorok	1 101,83	19	Pekan Bahorok
2	Serapit	98,50	10	Serapit
3	Salapian	221,73	17	Minta Kasih
4	Kutambaru	236,84	8	Kutambaru
5	Sei. Bingei	333,17	16	Namu Ukur
6	Kuala	206,23	16	Pekan Kuala
7	Selesai	167,73	14	Pekan Selesai
8	Binjai	42,05	7	Kwala Begumit
9	Stabat	108,85	12	Stabat Baru
10	Wampu	194,21	14	Bingai
11	Batang Serangan	899,38	8	Batang Serangan

12	Sawit Seberang	209,10	7	Sawit Seberang
13	Padang Tualang	221,14	12	Tanjung Selamat
14	Hinai	105,26	13	Tanjung Beringin
15	Secanggang	231,19	17	Hinai Kiri
16	Tanjung Pura	179,61	19	Pekan Tanjung
17	Gebang	178,49	11	Pekan Gebang
18	Babalan	76,41	8	Pelawi Utara
19	Sei. Lapan	280,68	14	Alur Dua
20	Brandan Barat	89,80	7	Tangkahan Durian
21	Besitang	720,74	9	Pekan Besitang
22	Pangkalan Susu	151,35	11	Pangkalan Susu
23	Pematang Jaya	209,00	8	Pematang Jaya
	<b>Jumlah</b>	<b>6263,29</b>	<b>277</b>	

Sumber : Bps Kabupten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

### 4.1.3 Kondisi Demografi

#### A. Jumlah Penduduk

Tabel 4. 4 Indikator Kependudukan Kabupaten Langkat

Uraian	2020	2021	2022
<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	1 030 202	1 034 519	1 039 926
<b>Pertumbuhan Penduduk (%)</b>	0,61	0,42	0,52
<b>Kepadatan Penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>	165	165	166,04
<b>Sex Ratio (L/P) (%)</b>	102,2	102,3	102,36
<b>% Persentase Penduduk menurut kel. Umur</b>			
<b>0 – 14 tahun</b>	25,53	25,24	24,97
<b>15 – 64 tahun</b>	69,52	69,52	

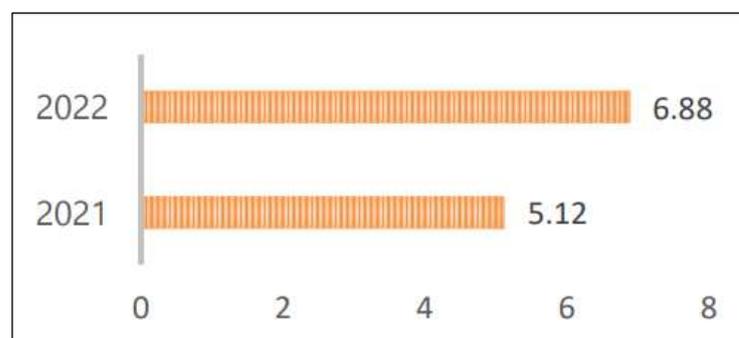
65+ tahun	4,95	5,23	5,51
-----------	------	------	------

Sumber : Kabupten Langkat Dalam Angka 2023 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Komposisi penduduk Kabupaten Langkat didominasi oleh generasi Z dan milenial. Generasi Z adalah lahir tahun 1997-2012, perkiraan usia sekarang 10-25 tahun. Generasi milenial lahir tahun 1981-1996, perkiraan usia sekarang 26-41 tahun. Proporsi generasi Z sebanyak 23,31 persen dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 24,60 persen dari total populasi Kabupaten Langkat. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Selama tahun 2021-2022 tingkat pertumbuhan penduduk tercatat meningkat sebesar 0,52 persen. Secara umum jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat terlihat dari sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100 yaitu sebesar 102,36.

## B. Ketenagakerjaan



Sumber : Kabupten Langkat Dalam Angka 2023 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 4. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Langkat**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Langkat mengalami peningkatan selama periode tahun 2021-2022, dimana TPT pada tahun 2022 sebesar 6,88 persen meningkat dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran yang cukup signifikan di daerah Kabupaten Langkat.

Tabel 4.

5

Statistik	Uraian	2020	2021	2022
	TPAK (%)	69,12	69,12	71,51
	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	7,02	5,12	6,88
	Bekerja (%)	65,01	65,57	66,59
	UMK (000 Rp)	2 711	2 711	2 711
	UMP (000 Rp)	2 499	2 499	2 522
	Bekerja di sektor A (%)	40,19	39,12	35,37
	Bekerja di sektor M (%)	21,31	19,77	20,28
	Bekerja di sektor S (%)	38,51	41,11	44,35

#### Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat

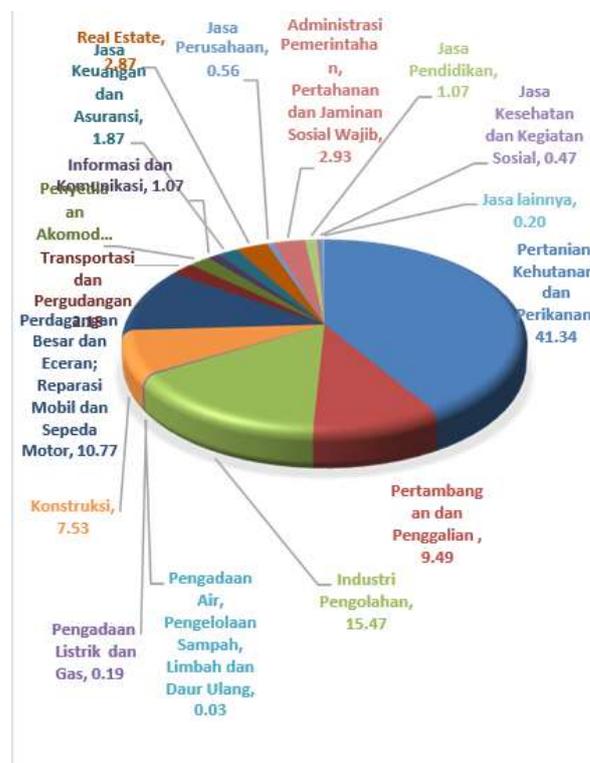
Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka 2023 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) ada 71,51 persen penduduk Langkat tahun 2022 termasuk dalam Angkatan kerja. Sektor jasa-jasa (S) mendominasi pasar kerja di Kabupaten Langkat sebesar 44,35 persen pada tahun 2022, yang diikuti dengan pertanian (A) persentase sebesar 35,37 persen. Semenjata pekerja di sektor manufaktur (M) sebanyak 20,28 persen.

UMK Langkat tahun 2022 tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yakni 2.722 ribu rupiah. Upah Minimum Provinsi (UMP) meningkat disbanding tahun 2021 yakni sebesar 2.522 ribu rupiah.

#### 4.1.4 Kondisi Ekonomi

##### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 4. 3 Distribusi Persentase PDRB Menurut Kategori di Kabupaten Langkat, 2022 (%)**

Struktur ekonomi menunjukkan besarnya kemampuan masing-masing kategori ekonomi dalam menciptakan nilai tambah, sekaligus menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan memproduksi barang dan jasa dari masing-masing kategori ekonomi.

Secara umum pada tahun 2022 ada lima kegiatan ekonomi yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Langkat yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; kategori pertambangan dan penggalian; dan kategori konstruksi, masing-masing sebesar 41,34 persen; 15,47 persen; 10,77 persen; 9,49 persen; dan 7,53 persen.

**Tabel 4. 6 Perkembangan PDRB Kabupaten Langkat**

Uraian	2020	2021	2022
<b>PDRB ADHB (Milyar Rp)</b>	43 208,00	46 301,20	<b>51 412,76</b>
<b>PDRB ADHK (2010=100) (Milyar Rp)</b>	29 343,26	30 247,39	<b>31 665,48</b>
<b>PDRB / Kapita ADHB (Ribu Rp)</b>	41 997,10	44 756,26	<b>49 438,87</b>
<b>PDRB / Kapita ADHK (Ribu Rp)</b>	28 520,91	29 238,12	<b>30 449,74</b>
<b>Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>-0,86</b>	<b>3,08</b>	<b>4,69</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2021 sebesar 44,76 juta rupiah, dan meningkat menjadi 49,44 juta rupiah pada tahun 2022.

## B. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menunjukkan besarnya kemampuan masing-masing kategori ekonomi dalam menciptakan nilai tambah, sekaligus menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan memproduksi barang dan jasa dari masing-masing kategori ekonomi.

Secara umum pada tahun 2022 ada lima kegiatan ekonomi yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Langkat. Kegiatan ekonomi yang cukup dominan dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Langkat yaitu kategori pertanian; kehutanan dan perikanan; kategori industry pengolahan; kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; kategori pertambangan dan penggalian; dan kategori konstruksi, masing-masing sebesar 41,34 persen; 15,47 persen; 10,77 persen; 9,49 persen; dan 7,53 persen.

## C. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kategori	Tahun				
	2018	2019	2020 <sup>†</sup> )	2021 <sup>*</sup> )	2022 <sup>**</sup> )
( <b>1</b> )	(2)	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( <b>6</b> )
<b>Pertanian Kehutanan dan Perikanan</b>	4,99	5,69	1,06	3,78	<b>5,85</b>

<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	5,36	5,88	-2,16	4,18	<b>4,52</b>
<b>Industri Pengolahan</b>	3,46	2,88	-1,93	2,26	<b>2,05</b>
<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	4,48	3,44	2,15	3,06	<b>4,12</b>
<b>Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang</b>	7,41	7,77	3,47	5,42	<b>2,82</b>
<b>Konstruksi</b>	5,62	4,88	-4,38	3,10	<b>6,97</b>
<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	5,19	3,71	-2,48	2,52	<b>3,53</b>
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	6,67	7,00	-9,38	-0,55	<b>8,44</b>
<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	7,27	8,56	-7,45	1,26	<b>6,22</b>
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	9,98	8,82	9,59	5,93	<b>0,76</b>
<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	4,26	3,63	0,21	3,94	<b>3,56</b>
<b>Real Estat</b>	6,43	5,06	0,40	0,14	<b>3,28</b>
<b>Jasa Perusahaan</b>	5,97	5,62	-5,33	-0,15	<b>7,34</b>
<b>Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	3,35	3,97	-0,49	-0,14	<b>-0,97</b>
<b>Jasa Pendidikan</b>	6,26	5,12	0,48	3,67	<b>3,20</b>
<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	6,25	5,36	-1,80	-0,14	<b>4,76</b>
<b>Jasa lainnya</b>	7,93	7,82	-7,11	2,88	<b>6,40</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5,02</b>	<b>5,07</b>	<b>-0,86</b>	<b>3,08</b>	<b>4,69</b>

Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

#### **D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita**

PDRB perkapita Kabupaten Langkat sebesar 49,44 juta rupiah. Dari perbandingan antar Kabupaten/Kota terpilih, PDRB perkapita Kabupaten Langkat tahun 2022 sebesar 49,44 juta rupiah, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Serdang Berdagai yang mencapai 50,18 juta rupiah.

## E. Gini Ratio

**Tabel 4. 7 Gini Ratio Kab. Langkat dan Sumatera Utara Tahun 2016-2022**

	Tahun						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Langkat	0,2834	0,2489	0,2534	0,2660	0,2378	0,2381	0,2600
Sumatera Utara	0,3190	0,3150	0,3176	0,3165	0,3161	0,3145	0,3120

Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Pada tahun 2022 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (Gini Ratio) Kabupaten Langkat tercatat sebesar 0,2600. Angka ini masih rendah dibandingkan dengan angka ketimpangan pengeluaran penduduk (Gini Ratio) di Sumatera Utara pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,3120.

### 4.1.5 Kondisi Sosial

#### A. Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan dibidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. IPM Kabupaten Langkat menduduki peringkat ke 16 dari 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi Sumatera Utara.



Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

#### Gambar 4. 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Langkat

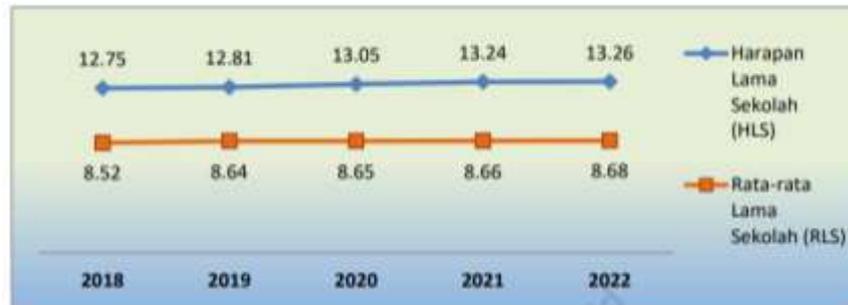
Selama periode tahun 2021-2022, angka IPM Kabupaten Langkat meningkat yakni tahun 2021 sebesar 71,35 naik menjadi 71,86 tahun 2022. Angka IPM ini sudah berada pada kriteria tinggi, namun pemerintah harus tetap memberi perhatian terhadap pembangunan manusianya agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal pembangunan dan bukan menjadi beban pembangunan.

#### B. Pendidikan

Tabel 4. 8 Statistik Pendidikan Kabupaten Langkat

Uraian	2021	2022
<b>Angka Buta Huruf</b>		
10-14	0,99	0,99
15-24	0,00	0,14
25-40	0,24	0,00
41-64	0,54	0,92
65+	7,99	6,22
<b>Angka Partisipasi Murni</b>		
SD Sederajat	99,74	94,99
SMP Sederajat	81,65	80,98
SMA Sederajat	77,98	64,06
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	8,66	8,68

Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))



Sumber : BPS Kabupaten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

#### **Gambar 4. 5 Perkembangan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Langkat, 2018-2022**

Sampai dengan tahun 2022, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Langkat telah mencapai 8,68 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia Pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,26 tahun atau mencapai Diploma I. Perkembangan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Langkat selama lima tahun terakhir secara umum terus meningkat.

Pada tahun 2018, harapan lama sekolah di Kabupaten Langkat sebesar 12,75 tahun secara konsisten terus meningkat menjadi 13,26 tahun pada tahun 2022. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah, pada tahun 2018 sebesar 8,52 tahun meningkat hingga 8,68 tahun pada tahun 2022. Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah tumbuh 0,44 persen per tahun lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah yang sebesar 0,4 persen per tahun.

### **C. Kesehatan**

**Tabel 4. 9 Statistik Kesehatan Kabupaten Langkat**

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Penolong Kelahiran(%)</b>			
<b>Tenaga Medis</b>	49,76	43,78	<b>48,89</b>
<b>Bidan/Perawat</b>	50,24	55,7	<b>50,79</b>
<b>Non TenagaKesehatan</b>	0,00	0,53	<b>0,32</b>
<b>Angka HarapanHidup (Thn)</b>	68,80	68,97	<b>69,39</b>
<b>Angka Kesakitan (%)</b>	<b>14,62</b>	<b>9,12</b>	<b>14,37</b>

Sumber : BPS Kabupten Langkat ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Persentase tertinggi penolong kelahiran di Kabupaten Langkat dilakukan oleh bidan/perawat yakni mencapai 50,79 persen, angka ini menurun dari tahun sebelumnya. Sementara itu, balita yang proses kelahirannya ditolong oleh dokter mencapai 48,89 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2022, penduduk Langkat yang mempunyai keluhan Kesehatan selama sebulan yang lalu sebesar 14,37 persen; 40,70 persen berobat jalan mengatasi keluhan Kesehatan tersebut, sedangkan 59,30 persen tidak berobat jalan. Hal ini disebabkan, karena tidak punya biaya berobat (0,04 persen), dengan mengobati sendiri (52,65 persen), merasa tidak perlu 46,34 persen), khawatir terpapar covid-19 (0,95 persen) dan alasan lainnya (0,12 persen).

## **4.2 Analisis Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Langkat**

### **Pasca Kebijakan SDGs Tahun 2016-2022**

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “*The Future We*

*Want*” dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada Septemberr 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kuliatas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam Upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota.

**Tabel 4. 10 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2022**

Indikator	Angka Kemiskinan
-----------	------------------

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	115,79	114,41	105,45	103,08	101,87	106,59	100,45
Persentase Penduduk Miskin	11,36	11,15	10,20	9,91	9,73	10,12	9,49

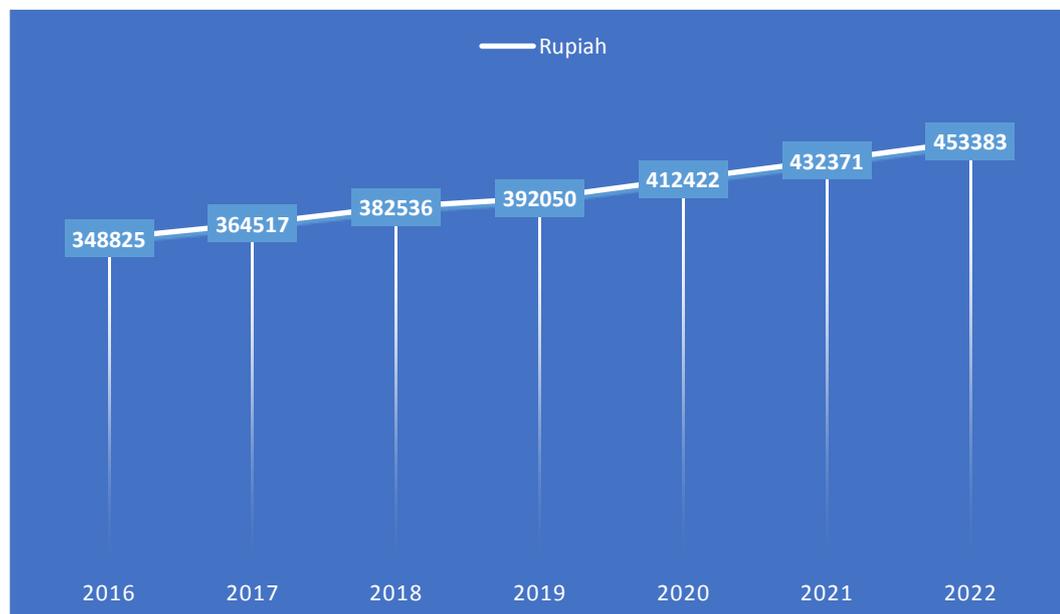
Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat pada periode tahun 2016-2022 ditunjukkan pada tabel diatas. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Langkat sebanyak 115,79 ribu jiwa, dan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 101,87 ribu jiwa. Namun, pada tahun 2021 sampai 2022 jumlah penduduk miskin berfluktuasi mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2021 melonjak mengalami kenaikan sebanyak 4,72 ribu jiwa menjadi 106,59 ribu jiwa penduduk miskin dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 100,45 ribu jiwa. Begitu juga dengan persentase penduduk miskin dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan menjadi 9,73 persen. Namun, pada tahun 2022 persentase kemiskinan Kabupaten Langkat lebih tinggi dibanding Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 9,49 persen.

Penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan terdapat penduduk yang pada tahun 2021 tergolong sebagai penduduk miskin namun pada tahun 2022 tidak lagi digolongkan sebagai penduduk miskin. Hal ini mungkin dikarenakan terdapat peningkatan rata – rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk tersebut di tahun 2022. Sehingga terdapat penduduk yang tergolong

miskin di tahun 2022 keluar dari golongan penduduk miskin di tahun 2022 karena rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya meningkat di atas garis kemiskinan.

Kelompok penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan merupakan kelompok yang rentan dapat mengubah komposisi penduduk miskin karena sangat sensitive terhadap perubahan garis kemiskinan. Penduduk yang masuk kelompok ini mudah untuk keluar dari golongan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran perkapitanya meningkat di atas garis kemiskinan namun mudah masuk kembali sebagai golongan penduduk miskin ketika rata-rata pengeluaran perkapitanya mengalami penurunan atau pengeluaran perkapitanya tetap namun garis kemiskinan di tahun tersebut mengalami penurunan.



Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

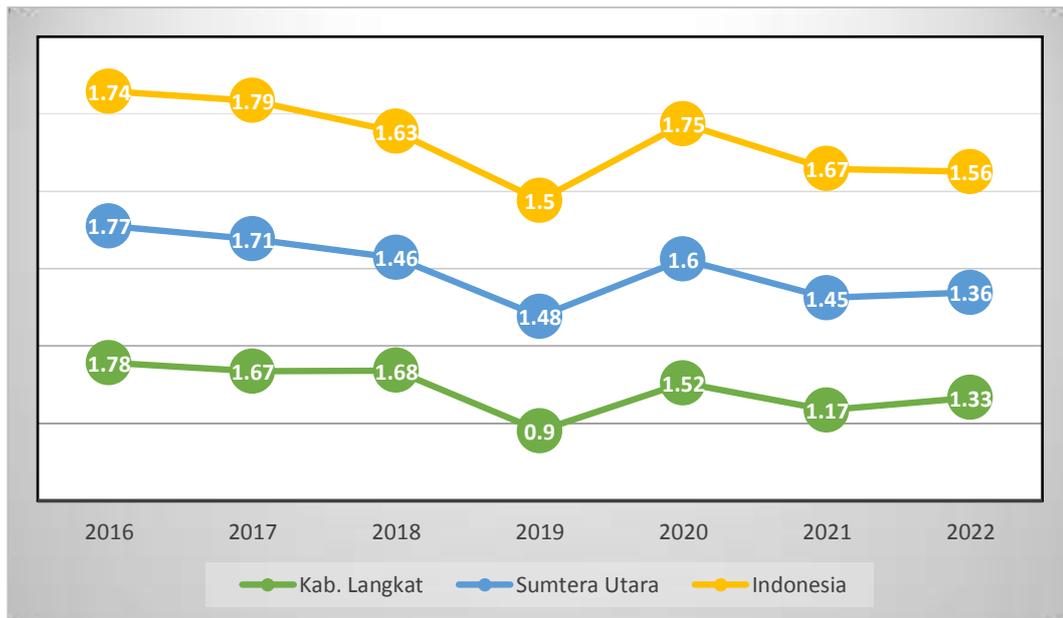
**Gambar 4. 6 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Langkat (2016-2022)**

Gambar diatas menunjukkan tren garis kemiskinan yang terlihat cenderung selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam satu dekade, garis

kemiskinan Kabupaten Langkat telah meningkat dari tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp. 348.825,- menjadi Rp. 453.383,- di tahun 2022. Jika dilihat dalam setahun terakhir, Garis kemiskinan di Kabupaten Langkat mengalami peningkatan 4,86 persen dari tahun sebelumnya. Adapun garis kemiskinan di tahun 2021 berada di level Rp. 432.371,- per kapita per bulan, kemudian meningkat sebesar 4,86 persen atau sebesar Rp. 21.012,- per kapita per bulan di tahun 2022 menjadi Rp. 453.383,- per kapita per bulan.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Indikator lain yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan variasi pengeluaran (ketimpangan) antara sesama penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan selain untuk upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, diharapkan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

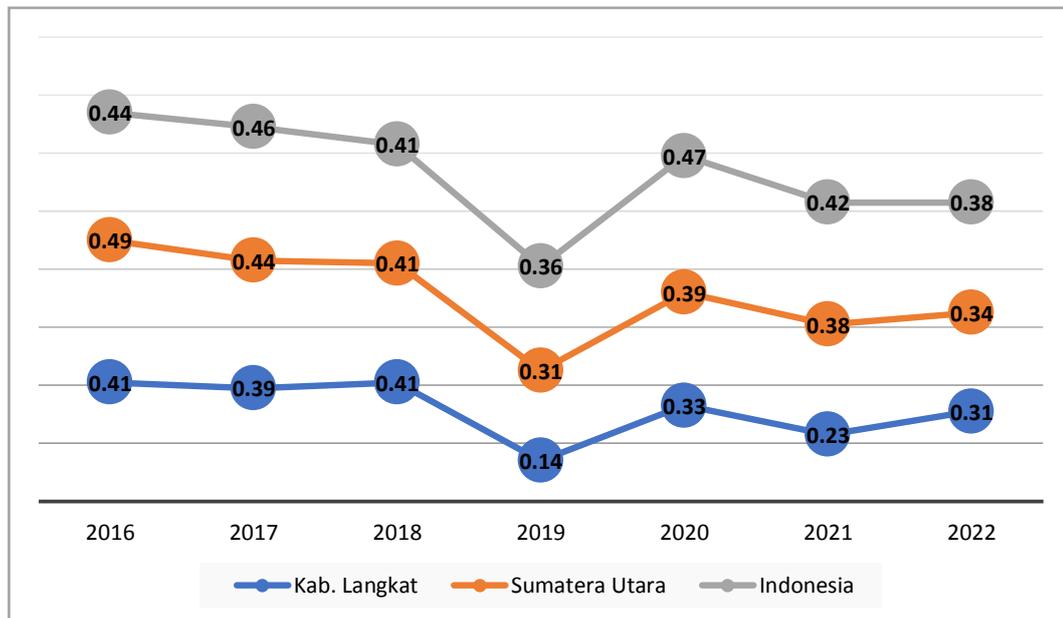


Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

#### Gambar 4. 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan 2016-2022

Dari gambar diatas terlihat bahwa dalam waktu 7 tahun terakhir perubahan Indeks Kedalaman Kemiskinan terlihat lebih berfluktuasi. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan terus mengalami penurunan menempati angka 1,5 kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,25% menempati angka 1,75. Pada tahun 2021 sampai pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan kembali mengalami penurunan, tahun 2022 menempati angka 1,33 poin. Perubahan nilai indeks kedua indeks ini mengidintikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga sedikit naik jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional, pada tahun 2022 angka Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Langkat masih berada di bawah angka Sumatera Utara dan Indonesia.



Sumber : BPS ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

**Gambar 4. 8 Indeks Keparahan Kemiskinan 2016-2022**

Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,08 poin dari 0,23 poin di tahun 2021 menjadi 0,31 poin di tahun 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan ketimpangan rata-rata pengeluaran per kapita antar penduduk miskin. Secara teori, jika kondisi rata-rata penduduk miskin relatif merata, maka akan lebih mudah bagi pemerintah untuk dapat menentukan dan melaksanakan program- program kemiskinan untuk memperbaiki kondisi kemiskinan pada kelompok miskin tersebut.

Pemerintah Kabupaten Langkat berupaya untuk lebih menurunkan tingkat jumlah penduduk miskin melalui program-program yang pro rakyat baik berupa

program peningkatan perekonomian masyarakat maupun perbaikan infrastruktur askes perekonomian masyarakat seperti pemberian bantuan bibit kepada petani, peningkatan kemampuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), pembangunan irigasi, jembatan dan jalan sampai ke pelosok daerah, walaupun belum semuanya dalam kondisi baik namun tidak ada lagi daerah yang terisolir di Kabupaten Langkat.

Pemerintah Kabupaten Langkat juga telah melakukan program-program seperti program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Khususnya program penanganan fakir miskin seperti pemberian bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.

### **4.3 Evaluasi Kebijakan Sdgs Dalam Mencapai 3 Poin Tujuan Sdgs Yaitu Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan, Menghilangkan Kelaparan Dan Menjamin Kehidupan Yang Sehat Untuk Capaian Sdgs.**

#### **4.3.1 Deskripsi Responden**

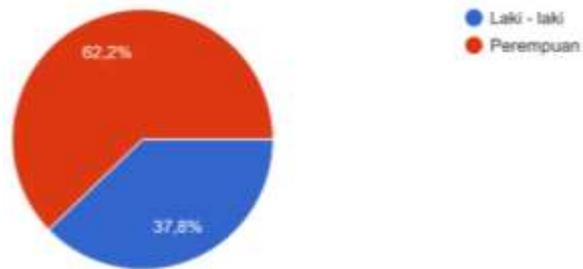
Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian yaitu rumah tangga miskin penerima bantuan pemerintah di wilayah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu tentang gambaran karakteristik responden yang dijadikan sampel pada penelitian ini yang meliputi jenis kelamin, umur dan tingkat Pendidikan. Data penelitian diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada seluruh

responden yang berjumlah 45 orang. Hasil kuesioner dapat dilihat pada Gambar Grafik di bawah ini :

#### 4.3.2 Idesntitas Responden

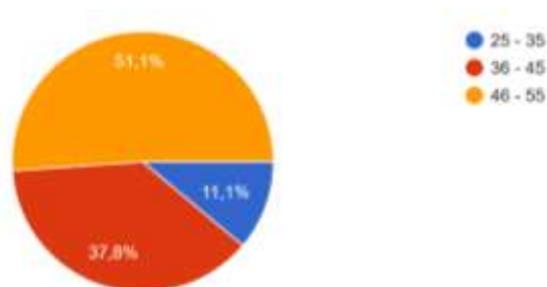
##### 1) Jenis kelamin



**Gambar 4. 9 Jenis Kelamin**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang berjenis kelamin Perempuan ada sebanyak 28 responden, dan responden yang berjenis kelamin Laki-laki ada sebanyak 17 responden.

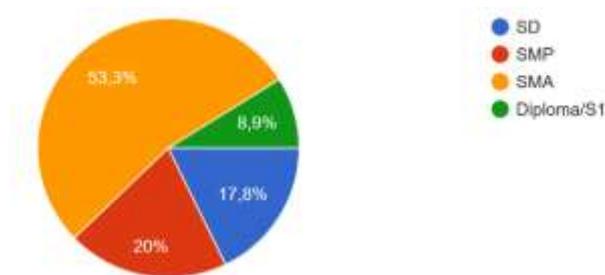
##### 2) Usia



**Gambar 4. 9 Usia**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 5 responden (11,1%), responden yang berusia 36-45 tahun ada sebanyak 17 responden (37,8%), dan responden yang berusia 46-55 tahun ada sebanyak 23 responden (51,1%). Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura yang memperoleh bantuan mayoritas berusia lanjut.

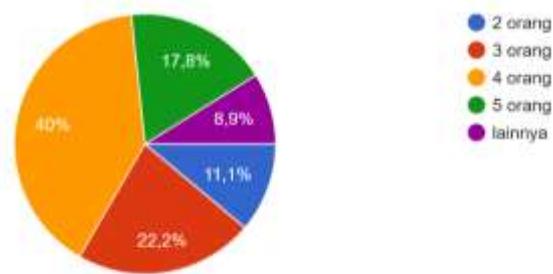
### 3) Pendidikan



**Gambar 4. 10 Pendidikan**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang menempuh Pendidikan sampai ke jenjang Diploma/S1 ada sebanyak 4 responden (8,9%), responden yang menempuh Pendidikan sampai ke jenjang SMA ada sebanyak 24 responden (53,3%), responden yang menempuh Pendidikan sampai ke jenjang SMP ada sebanyak 9 responden (20%), dan responde yang menempuh Pendidikan hanya sampai ke jenjang SD sebanyak 8 responden (17,8%).

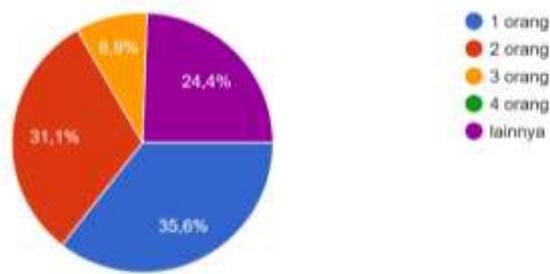
### 4) Jumlah Tanggungan Keluarga



**Gambar 4. 11 Jumlah Tanggungan Keluarga**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga 2 orang ada sebanyak 5 responden (11,1%), responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga 3 orang ada sebanyak 10 responden (22,2%), responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga 4 orang ada sebanyak 18 responden (40%), responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga 5 orang ada sebanyak 8 responden (17,8%) dan responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga lebih dari 5 orang ada sebanyak 4 responden (8,9%).

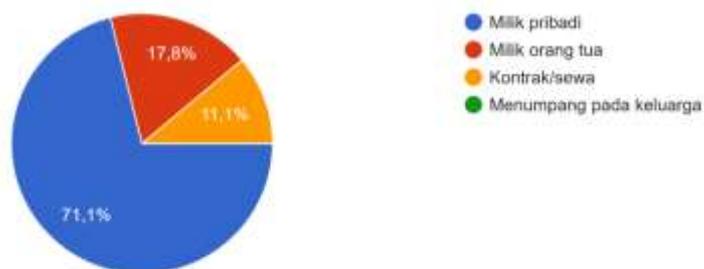
##### **5) Jumlah Tanggungan Usia Sekolah**



**Gambar 4. 12 Jumlah Tanggungan Usia Sekolah**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga usia sekolah 1 orang ada sebanyak 16 responden (35,6%), responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga usia sekolah 2 orang ada sebanyak 14 responden (31,1%), responden yang memiliki jumlah tanggungan keluarga usia sekolah 3 orang ada sebanyak 4 responden (8,9%), dan responden yang tidak memiliki jumlah tanggungan keluarga usia sekolah ada sebanyak 11 responden (24,4%).

#### 6) Status Kepemilikan Rumah

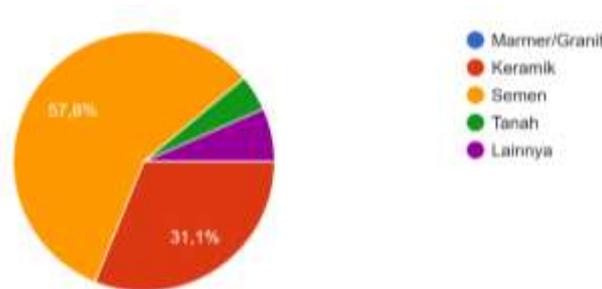


**Gambar 4. 13 Status Kepemilikan Rumah**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang

memiliki status kepemilikan rumah milik pribadi ada sebanyak 32 responden (71,1%), responden yang memiliki status kepemilikan rumah milik orang tua ada sebanyak 8 responden (17,8%), dan responden yang memiliki status kepemilikan rumah kontrak/sewa ada sebanyak 5 responden (11,1%).

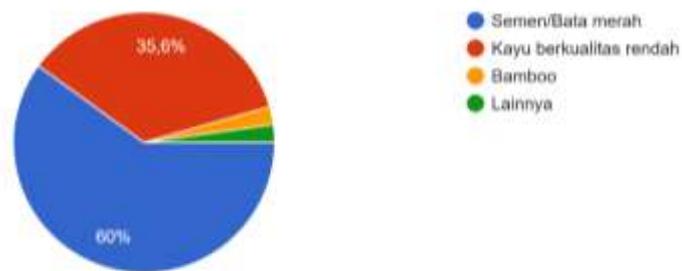
### 7) Jenis Lantai Tempat Tinggal Terluas



**Gambar 4. 14 Jenis Lantai Tempat Tinggal Terluas**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang memiliki lantai terluas semen ada sebanyak 26 responden (57,8%), responden yang memiliki lantai terluas keramik ada sebanyak 14 responden (31,1%). Hal ini menunjukkan mayoritas responden memiliki lantai semen.

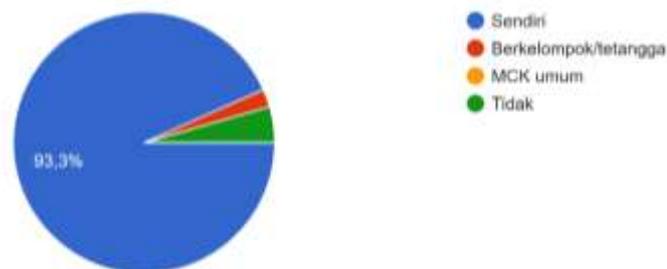
### 8) Dinding Rumah



**Gambar 4. 15 Jenis Dinding Rumah**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang memiliki dinding rumah terbuat semen/bata merah ada sebanyak 27 responden (60%), responden yang memiliki dinding rumah terbuat kayu berkualitas rendah ada sebanyak 16 responden (35,6%). Hal ini menunjukkan mayoritas responden memiliki dinding rumah terbuat semen/bata merah.

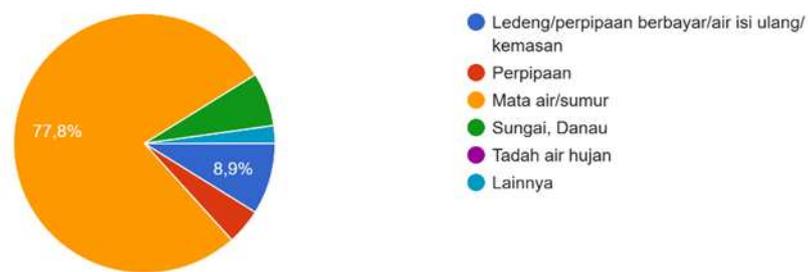
#### 9) Fasilitas MCK



**Gambar 4. 16 Fasilitas MCK**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang memiliki fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) milik sendiri ada sebanyak 42 responden (93,3%). Hal ini menunjukkan mayoritas responden memiliki fasilitas MCK milik sendiri.

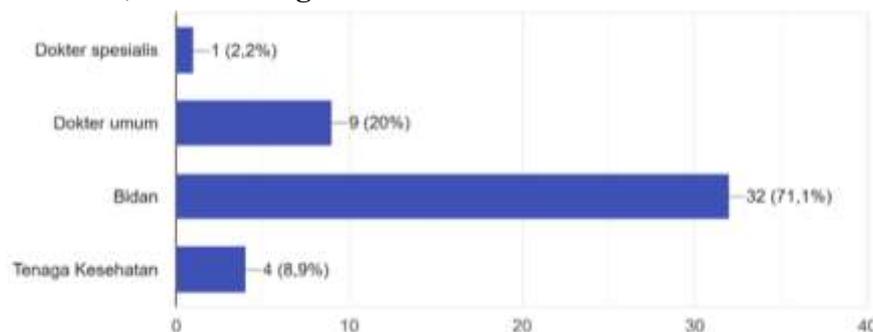
#### 10) Sumber Air Mandi Terbanyak



**Gambar 4. 17 Sumber Air Mandi Terbanyak**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang memiliki sumber air mandi terbanyak bersumber dari mata air/sumur yaitu sebanyak 35 responden (77,8%). Hal ini menunjukkan mayoritas responden memiliki sumber air mandi terbanyak bersumber dari mata air/sumur.

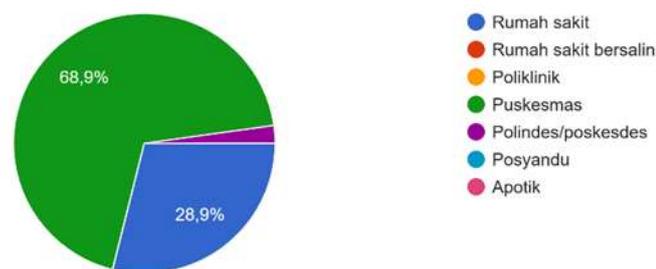
#### 11) Akses Tenaga Kesehatan Terdekat



**Gambar 4. 18 Akses Tenaga Kesehatan Terdekat**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang dekat dengan tenaga kesehatan terdekat yang terbanyak adalah bidan ada sebanyak 32 responden (71,1%). Hal ini menunjukkan mayoritas responden dekat dengan tenaga kesehatan bidan.

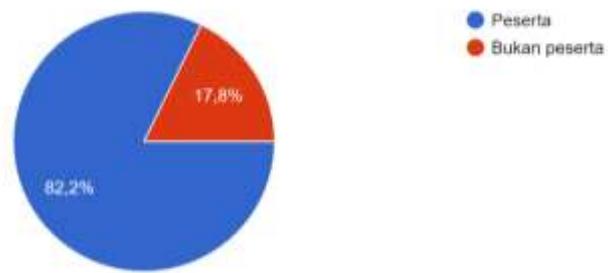
### 12) Akses Fasilitas Kesehatan Terdekat



**Gambar 4. 19 Akses Fasilitas Kesehatan Terdekat**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang dekat dengan akses fasilitas kesehatan puskesmas ada sebanyak responden (68,9%) dan responden yang dekat dengan akses fasilitas kesehatan terdekat rumah sakit ada sebanyak responden (28,9%). Hal ini menunjukkan mayoritas responden dekat dengan fasilitas kesehatan puskesmas.

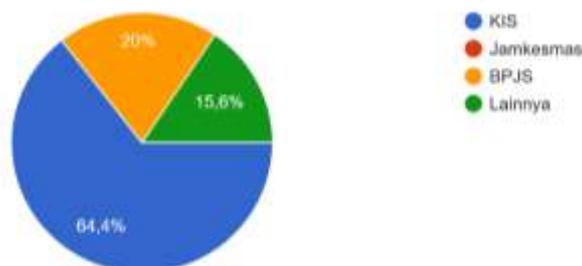
### 13) Jaminan Sosial Kesehatan



**Gambar 4. 20 Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang merupakan peserta jaminan Kesehatan ada sebanyak 37 responden (82,2%), dan yang bukan peserta jaminan kesehatan ada sebanyak 8 responden (17,8%)

### 14) Jenis Jaminan Kesehatan yang dimiliki

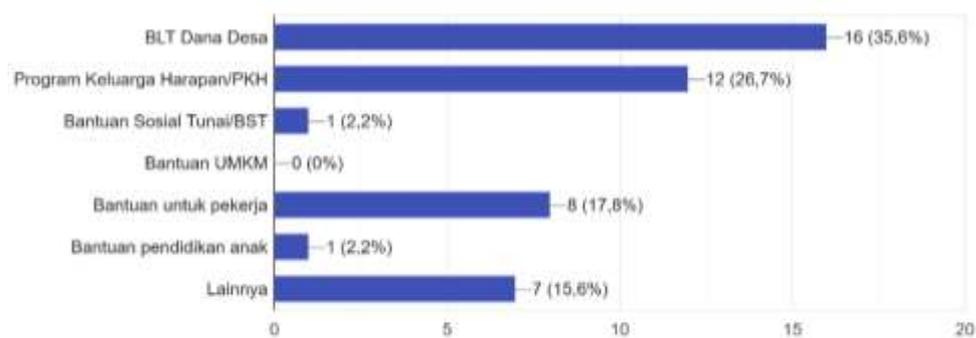


**Gambar 4. 21 Jenis Jaminan Kesehatan**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, responden yang memiliki jaminan Kesehatan KIS ada sebanyak 29 responden (64,4%), yang

memiliki jaminan Kesehatan BPJS ada sebanyak 9 responden (20%), yang memiliki jaminan Kesehatan selain KIS dan BPJS ada sebanyak 7 responden. Hal ini menunjukkan mayoritas responden memiliki jaminan Kesehatan KIS di Kecamatan Tanjung Pura.

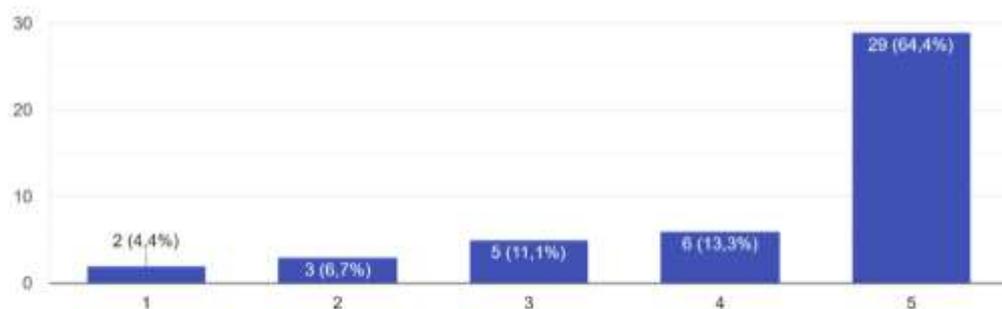
### 15) Jenis Bantuan yang Diterima



**Gambar 4. 22 Jenis Bantuan yang Diterima**

Dari data di atas menunjukkan 45 responden rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura. Dari hasil penyebaran kuesioner, mayoritas responden adalah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

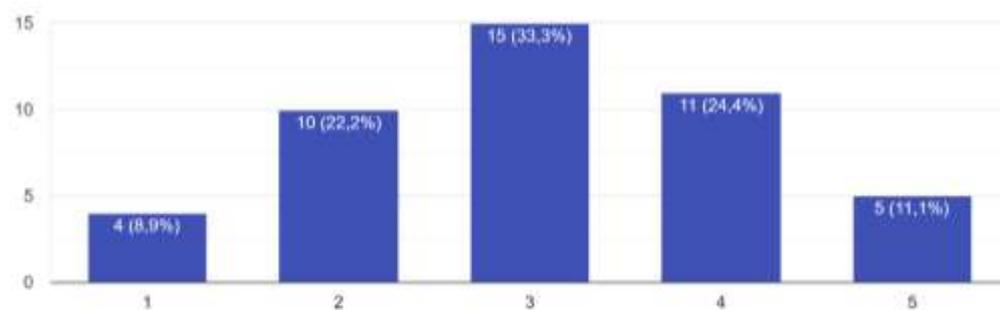
### 16) Penyaluran dana program bantuan sudah sangat tepat waktu



**Gambar 4. 23 Penyaluran dana program bantuan sudah sangat tepat waktu**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 10 responden menyatakan tidak setuju dengan penyaluran dana bantuan sudah sangat tepat waktu, dan 35 responden menyatakan setuju dengan penyaluran dana bantuan yang disalurkan sudah sangat tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa dana program bantuan yang disalurkan dianggap sudah disalurkan dengan tepat waktu di Kecamatan Tanjung Pura.

**17) Pembagian dana program bantuan dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin**

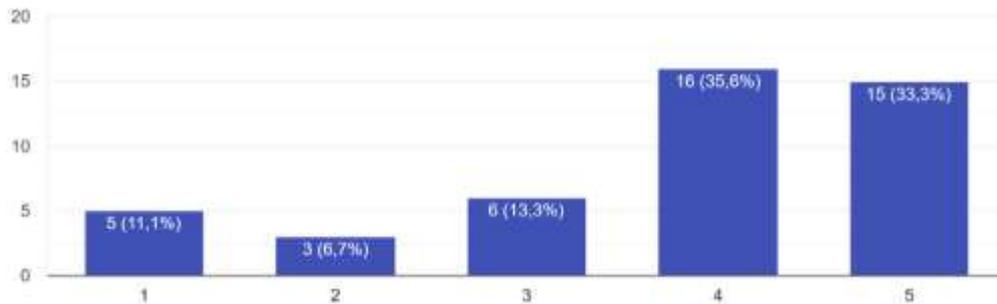


**Gambar 4. 24 Pembagian dana program bantuan dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 29 responden menyatakan tidak setuju dengan pembagian dana program bantuan dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin, dan 16 responden menyatakan setuju dengan pembagian dana program bantuan dilakukan secara merata kepada rumah tangga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa dana program bantuan dianggap tidak

dilakukan secara merata hanya untuk rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura.

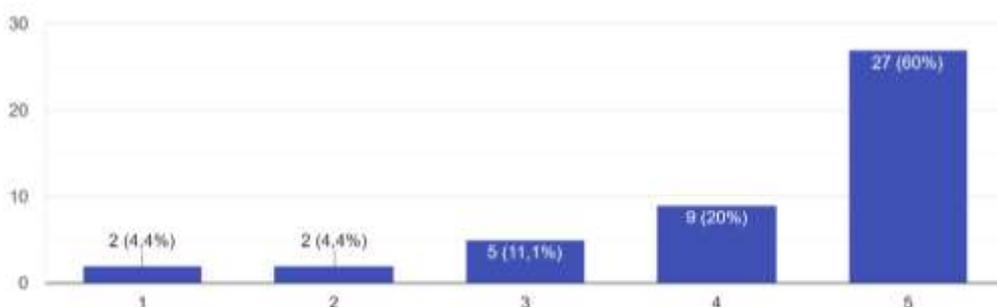
**18) Penyaluran dana program bantuan sudah berjalan dengan baik**



**Gambar 4. 25 Penyaluran dana program bantuan sudah berjalan dengan baik**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 14 responden menyatakan tidak setuju dengan penyaluran dana program bantuan sudah berjalan dengan baik, dan 31 responden menyatakan setuju dengan penyaluran dana program bantuan sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran dana program bantuan dianggap sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Tanjung Pura.

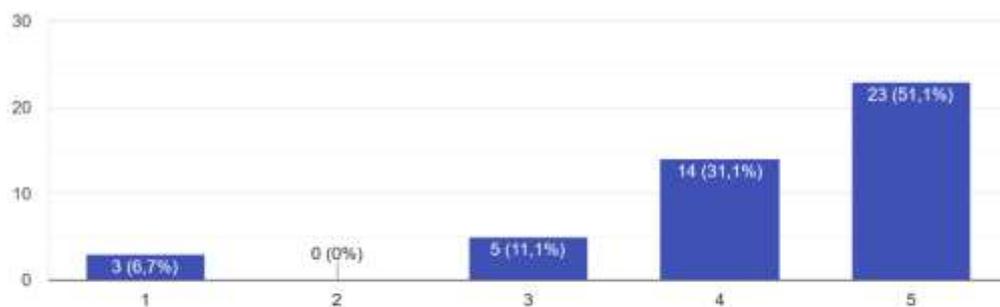
**19) Program bantuan yang diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari**



**Gambar 4. 26 Program bantuan yang diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 9 responden menyatakan tidak setuju dengan program bantuan yang diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan 36 responden menyatakan setuju dengan program bantuan yang diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan yang diterima dianggap sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi penerima bantuan di Kecamatan Tanjung Pura.

#### **20) Program bantuan yang telah berjalan mampu mengentaskan kemiskinan**

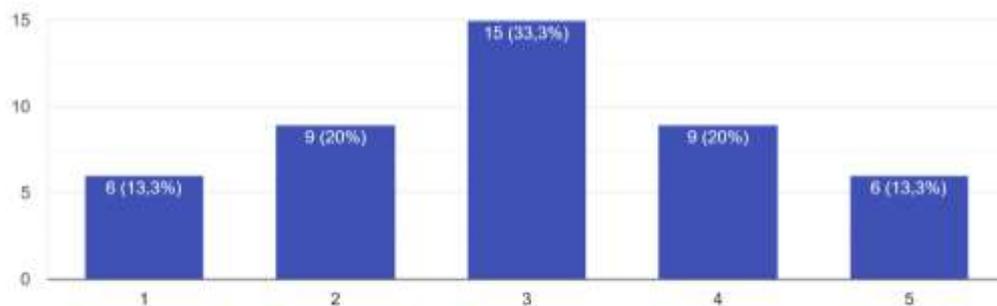


**Gambar 4. 27 Program bantuan yang telah berjalan mampu mengentaskan kemiskinan**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 8 responden menyatakan tidak setuju dengan program bantuan yang telah berjalan mampu mengentaskan kemiskinan, dan 37 responden menyatakan setuju dengan program bantuan yang telah berjalan mampu mengentaskan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa

program bantuan yang telah berjalan dianggap mampu mengentaskan kemiskinan bagi penerima bantuan di Kecamatan Tanjung Pura.

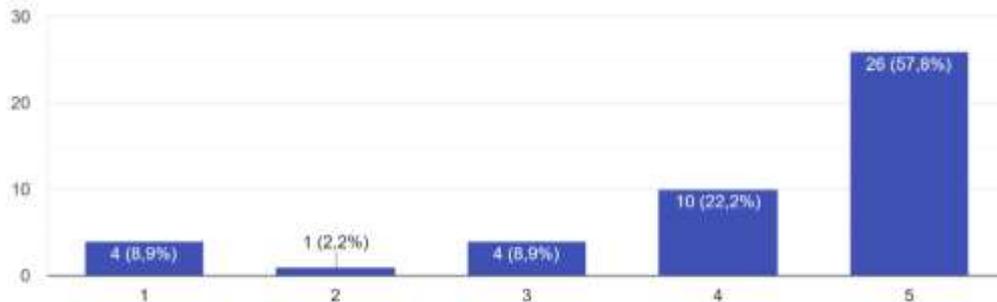
### 21) Program bantuan sudah tepat sasaran



**Gambar 4. 28 Program bantuan sudah tepat sasaran**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 30 responden menyatakan tidak setuju dengan program bantuan sudah tepat sasaran, dan 15 responden menyatakan setuju dengan program bantuan sudah tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan dianggap tidak tepat sasaran bagi penerima bantuan di Kecamatan Tanjung Pura.

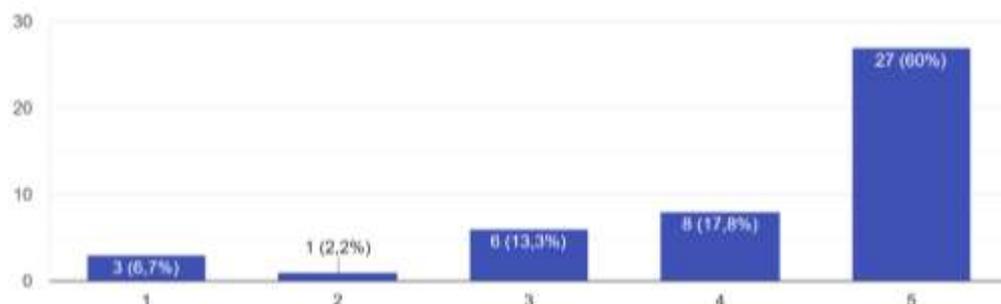
**22) Program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal pendidikan**



**Gambar 4. 29 Program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal pendidikan**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 9 responden menyatakan tidak setuju dengan program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal Pendidikan, dan 36 responden menyatakan setuju dengan program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan dianggap membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal Pendidikan bagi penerima bantuan di Kecamatan Tanjung Pura.

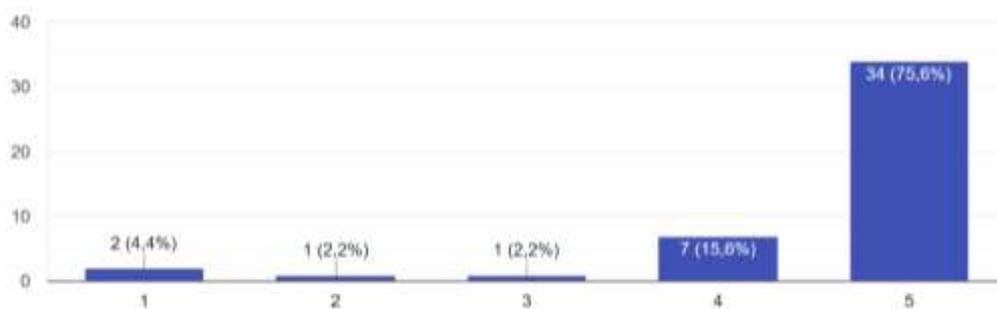
**23) Program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal kesehatan**



**Gambar 4. 30 Program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal kesehatan**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 10 responden menyatakan tidak setuju dengan program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal Kesehatan, dan 35 responden menyatakan setuju dengan program bantuan membantu mengurangi beban pengeluaran dalam hal Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan dianggap membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal Kesehatan bagi penerima bantuan di Kecamatan Tanjung Pura.

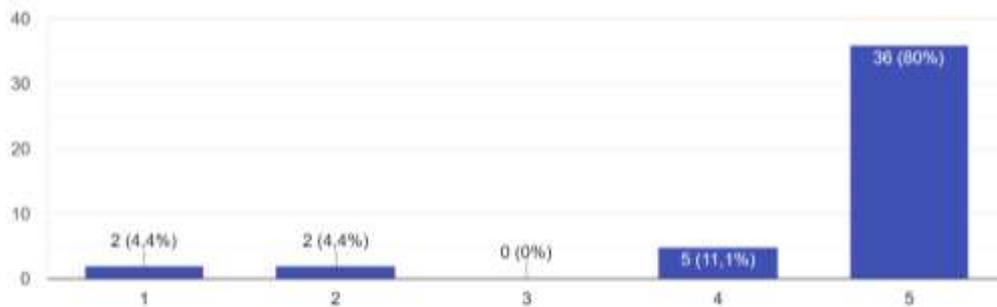
#### **24) Setiap anggota keluarga memperoleh layanan vaksinasi**



**Gambar 4. 31 Setiap anggota keluarga memperoleh layanan vaksinasi**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 4 responden menyatakan tidak setuju dengan setiap anggota keluarga memperoleh layanan vaksinasi, dan 41 responden menyatakan setuju dengan setiap anggota keluarga memperoleh layanan vaksinasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga dianggap memperoleh vaksinasi di Kecamatan Tanjung Pura.

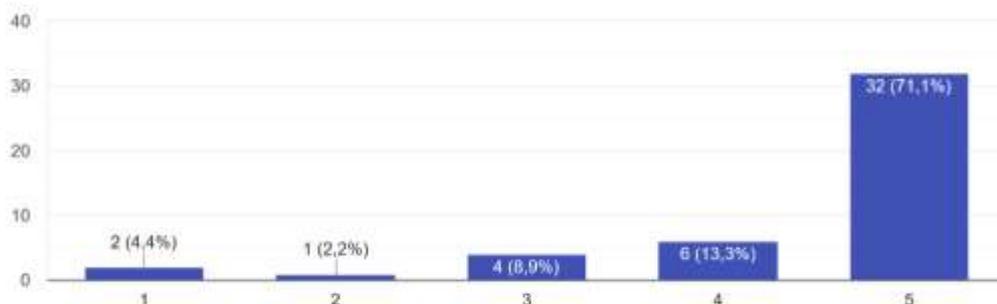
**25) Setiap anggota keluarga baru (bayi) memperoleh layanan imunisasi**



**Gambar 4. 32 Setiap anggota keluarga baru (bayi) memperoleh layanan imunisasi**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 4 responden menyatakan tidak setuju dengan setiap anggota baru (bayi) memperoleh layanan imunisasi, dan 41 responden menyatakan setuju dengan setiap anggota keluarga baru (bayi) memperoleh layanan imunisasi, hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota baru (bayi) dianggap memperoleh layanan imunisasi di Kecamatan Tanjung Pura.

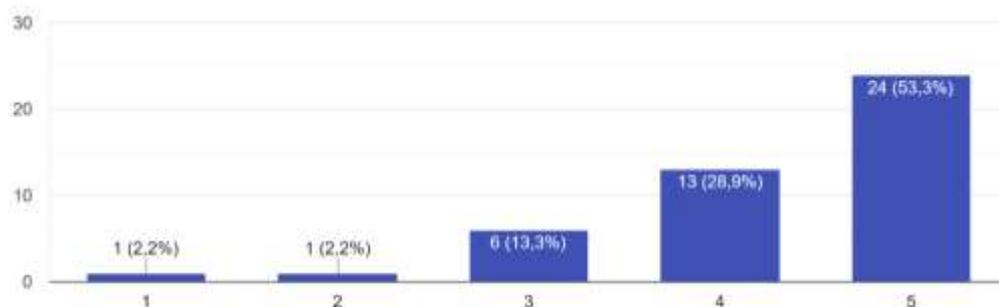
**26) Setiap ibu hamil memperoleh makanan tambahan**



**Gambar 4. 33 Setiap ibu hamil memperoleh makanan tambahan**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 7 responden menyatakan tidak setuju dengan setiap ibu hamil memperoleh makanan tambahan, dan 38 responden menyatakan setuju dengan setiap ibu hamil memperoleh makanan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ibu hamil dianggap memperoleh makanan tambahan di Kecamatan Tanjung Pura.

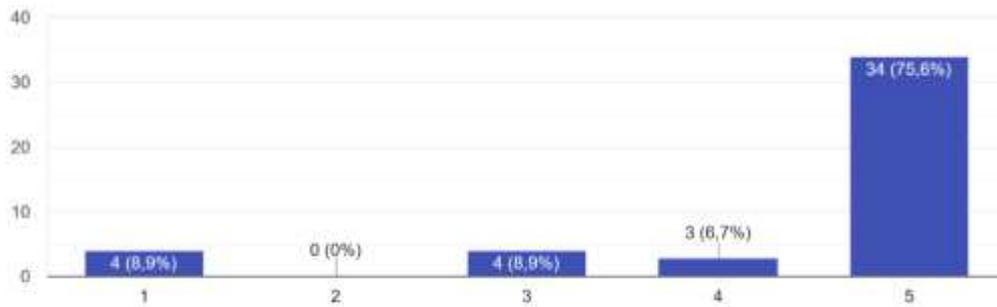
### 27) Memperoleh layanan fasilitas Kesehatan yang baik



**Gambar 4. 34 Memperoleh layanan fasilitas Kesehatan yang baik**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 8 responden menyatakan tidak setuju dengan memperoleh layanan fasilitas Kesehatan yang baik, dan 37 responden menyatakan setuju dengan memperoleh layanan fasilitas kesehatan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dianggap memperoleh layanan fasilitas Kesehatan yang baik di Kecamatan Tanjung Pura.

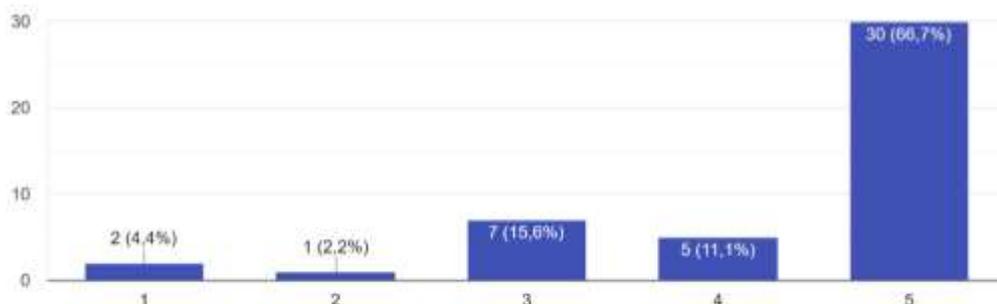
### 28) Ketersediaan air bersih yang cukup



**Gambar 4. 35 Ketersediaan air bersih yang cukup**

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 8 responden menyatakan tidak setuju dengan ketersediaan air bersih yang cukup, dan 37 responden menyatakan setuju dengan ketersediaan air bersih yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih dianggap sudah cukup baik di Kecamatan Tanjung Pura.

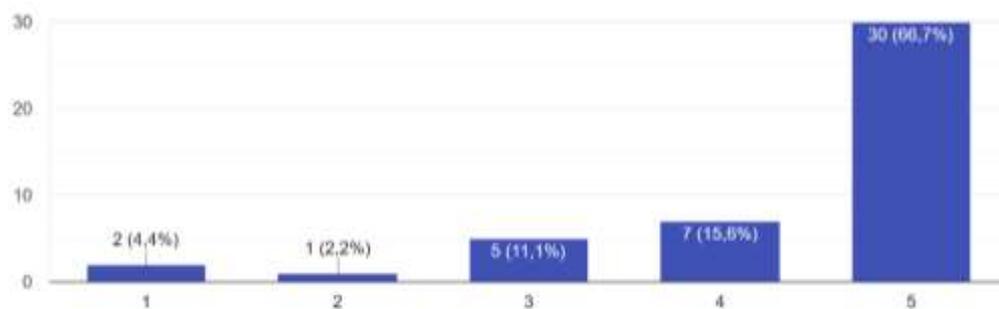
### 29) Memperoleh informasi tentang stunting dan pencegahannya



**Gambar 4. 36 Memperoleh informasi tentang stunting dan pencegahannya**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa 10 responden menyatakan tidak setuju dengan memperoleh informasi tentang stunting dan pencegahannya, dan 35 responden menyatakan setuju dengan memperoleh informasi tentang stunting dan pencegahannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dianggap sudah memperoleh informasi tentang stunting dan pencegahannya di Kecamatan Tanjung Pura.

### 30) Memperoleh layanan jaminan Kesehatan yang baik



**Gambar 4. 37** Memperoleh layanan jaminan Kesehatan yang baik

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 8 responden menyatakan tidak setuju dengan memperoleh layanan jaminan Kesehatan yang baik, dan 37 responden menyatakan setuju dengan memperoleh layanan Kesehatan yang baik, hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dianggap sudah memperoleh layanan jaminan Kesehatan yang baik di Kecamatan Tanjung Pura.

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuesioner yang telah dilakukan terlihat bahwa program bantuan yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin di Kecamatan Tanjung Pura dianggap mampu dalam mengurangi angka

kemiskinan, karena dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari baik untuk Pendidikan maupun Kesehatan. Hal ini terlihat juga bahwa pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Pura dianggap sudah baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan diberbagai daerah tepencil bahwa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dianggap mampu untuk mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah telah berhasil melakulan kebijakan dan diharapkan pemerintah agar terus mempertahankan dan meningkatkan upayanya untuk terus menurunkan angka kemiskinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat menunjukkan kecenderungan menurun pasca kebijakan SDGs. SDGs menjadi upaya terpadu dalam mewujudkan tujuan utama dan fokus utama dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini diwujudkan dengan berbagai upaya dan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat.
2. Program bantuan yang diberikan pemerintah dianggap mampu membantu dalam mengurangi angka kemiskinan penduduk. Program bantuan pemerintah membantu perekonomian rumah tangga miskin karena dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah, serta kebutuhan dalam hal kesehatan. Penyaluran dana program bantuan dinilai sangat baik.
3. Sebagian besar rumah tangga miskin di Kabupaten Langkat mendapatkan jaminan social kesehatan yang menjamin kesediaan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pemerintah juga dianggap sudah memberikan layanan kesehatan yang baik kepada rumah tangga miskin di Kabupaten Langkat.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, adapun saran sebagai berikut :

Pemerintah diharapkan dapat terus meningkatkan upaya dalam mengurangi angka kemiskinan serta dalam upaya menjamin kehidupan sehat bagi masyarakat di Kabupaten Langkat. Dengan berbagai macam kebijakan pemerintah diharapkan berjalan dengan baik dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di Kabupaten Langkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sari, A. I., & Indrawati, L. R. (2021). IMPLEMENTASI SDG'S DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.
- Zaini, I. F. (2021). *KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus: Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)= SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) POLICY IN REDUCING POVERTY OF RURAL SOCIETY (Case Study: Wargajaya Village, Cigudeg District, Regency Of Bogor, Jawa Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Rahayu, S. E., RS, P. H., & Sinambela, E. (2022). Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Untuk Mensejahterakan Masyarakat Tanpa Kemiskinan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 3, No. 1, pp. 439-462).
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Jumlah (Juta Orang) dan Persentase Penduduk Miskin Di Indonesia 2012-2022. BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau Pada September 2022. BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2010-2022. BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, Maret 2022. BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, 2017-2022. BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. Profil Kemiskinan Kabupaten Langkat 2022. BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Kuncorondo Persada. Kuncoro, Mudrajad. (2000). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Kuncoro, Mudrajad. (2000). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, Kebijakan (Edisi Pertama). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas). Jakarta: Erlangga

Panduan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem., <https://sepakat.bappenas.go.id/>

## LAMPIRAN

### KUESIONER PENELITIAN IMPLEMENTASI INDIKATOR *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) DI KABUPATEN LANGKAT

Dengan kerendahan hati saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan yang saya berikan. Data ini diperlukan sebagai tambahan informasi dalam penyusunan skripsi saya yang berjudul “**Impelemtasi Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Langkat**”.

#### A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. Alamat : \_\_\_\_\_
3. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
4. Usia :  25-35  36-45  46-55
5. Tingkat Pendidikan :  SD  SMP  SMA
6. Pekerjaan : \_\_\_\_\_

#### B. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA

1. Jumlah tanggungan keluarga :
  - a. 2 orang
  - b. 3 orang
  - c. 4 orang
  - d. 5 orang

- e. Lainnya...
2. Jumlah tanggungan keluarga usia sekolah :
- a. 1 orang
  - b. 2 orang
  - c. 3 orang
  - d. 4 orang
  - e. Lainnya...

### **C. KONDISI TEMPAT TINGGAL**

1. Status kepemilikan rumah :
- a. Milik pribadi
  - b. Milik orang tua
  - c. Kontrak/Sewa
  - d. Menumpang pada keluarga
2. Jenis lantai tempat tinggal terluas :
- a. Marmer/Granit
  - a. Keramik
  - b. Semen
  - c. Lainnya...
3. Dinding Sebagian besar rumah :
- a. Semen/Bata Merah
  - b. Kayu berkualitas rendah

- c. Bamboo
  - d. Lainnya...
4. Fasilitas MCK :
- a. Sendiri
  - a. Berkelompok/tetangga
  - b. MCK umum
  - c. Lainnya...
5. Tempat pembuangan sampah :
- a. Tidak ada
  - b. Di kebun/Sungai/drainase
  - c. Dibakar
  - d. Tempat sampah
  - e. Tempat sampah diangkut regular
6. Sumber air mandi terbanyak :
- a. Ledeng/perpipaan berbayar/air isi ulang/kemasan
  - b. Perpipaan
  - c. Mata air/sumur
  - d. Sungai, danau
  - e. Tadah air hujan
  - f. Lainnya

#### **D. AKSES KESEHATAN**

1. Akses tenaga kesehatan terdekat :
  - a. Dokter spesialis
  - b. Dokter umum
  - c. Bidan
  - d. Tenaga Kesehatan
  
2. Akses fasilitas Kesehatan terdekat :
  - a. Rumah sakit
  - b. Rumah sakit bersalin
  - c. Poliklinik
  - d. Puskesmas
  - e. Polindes/Poskesdes
  - f. Posyandu
  - g. Apotik
  
3. Jaminan sosial Kesehatan :
  - a. Peserta
  - b. Bukan peserta
  
4. Jenis jaminan Kesehatan yang dimiliki :
  - a. KIS
  - b. Jamkesmas
  - c. BPJS
  - d. Lainnya

**JENIS BANTUAN YANG DITERIMA**

- BLT Dana Desa;
- Program Keluarga Harapan/PKH;
- Bantuan Sosial Tunai/BST;
- Bantuan UMKM;
- Bantuan untuk Pekerja;
- Bantuan pendidikan anak;
- Lainnya...

1. Lama menerima bantuan :

- a. < 1 tahun
- b. 1 tahun
- c. 2 tahun
- d. > 2 tahun
- e. Lainnya...

2. Jumlah yang diterima :

- a. Rp. 300.000
- b. Rp. 600.000
- c. Rp. 1.000.000
- d. Rp. 1.200.000
- e. Lainnya...

Waktu menerima :

- a. 1 bulan sekali
- b. 3 bulan sekali
- c. 6 bulan sekali
- d. 1 tahun sekali
- e. Lainnya...

**PERTANYAAN KHUSUS :**

Petunjuk pengisian :

Isilah jawaban sesuai pendapat anda dengan berikan tingkat penilaian pada kolom yang tersedia.

Jawaban yang tersedia berupa skala likert, yaitu 1-5 yang mempunyai arti :

1 = Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Benar

2 = Tidak Setuju/Tidak Benar

3 = Netral

4 = Setuju/Benar

5 = Sangat Setuju/Sangat Benar

1. Penyaluran dana program bantuan sudah sangat tepat waktu.

1    2    3    4    5

2. Pembagian dana program bantuan dilakukan secara merata hanya kepada rumah tangga miskin.

1    2    3    4    5

3. Penyaluran dana bantuan sudah berjalan dengan baik.

1   2   3   4   5

4. Program bantuan yang diterima sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari.

1   2   3   4   5

5. Program bantuan yang telah berjalan mampu mengentaskan kemiskinan.

1   2   3   4   5

6. Program bantuan sudah tepat sasaran.

1   2   3   4   5

7. Program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal Pendidikan.

1   2   3   4   5

8. Program bantuan membantu dalam mengurangi beban pengeluaran dalam hal Kesehatan.

1 2 3 4 5

9. Setiap anggota keluarga memperoleh layanan vaksinasi.

1 2 3 4 5

10. Setiap anggota keluarga baru (bayi) memperoleh layanan imunisasi.

1 2 3 4 5

11. Setiap ibu hamil memperoleh makanan tambahan.

1 2 3 4 5

12. Memperoleh layanan fasilitas Kesehatan yang baik.

1 2 3 4 5

13. Ketersediaan air bersih yang cukup.

1 2 3 4 5

14. Memperoleh informasi tentang stunting dan pencegahannya.

1 2 3 4 5

15. Memperoleh layanan jaminan social Kesehatan yang baik.

1 2 3 4 5